



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN PLT. DIRJEN  
MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI, DIRUT PT TIMAH TBK, PJ.  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BUPATI BELITUNG  
TIMUR, DAN BUPATI BANGKA TENGAH SERTA KETUM ASOSIASI  
EKSPORTIR TIMAH INDONESIA DAN SEKRETARIAT BERSAMA  
ORGANISASI MASYARAKAT BELITUNG TIMUR**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024  
Waktu : Pukul 13.33 WIB s.d. 15.49 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Lantai 1, Jakarta  
Ketua Rapat : Dony Maryadi Oekon, S.T (F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan  
2. Lain-lain.  
Hadir : 16 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

5. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. Lamhot Sinaga
2. Bambang Hermanto, S.E.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Indira Chunda Thita, S.SE., M.M.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

0 orang anggota dari 5 anggota:

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

0 orang anggota dari 3 anggota:

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Bambang Suswanto (Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI)
2. Sunindyo Suryo Herdadi (Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara)
3. Safrizal (Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)



4. Burhanudin (Bupati Belitung Timur)
5. Algafry Rahman (Bupati Bangka Tengah)
6. Ahmad Dani Vorsal (Dirut PT. Timah Tbk)
7. Perwakilan Ormas Sekber Belitung Timur

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bisa kita mulai?

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM beserta jajarannya,  
Yang saya hormati, yang kami hormati Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Bupati Belitung Timur beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Bupati Bangka Tengah beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Dirut PT Timah Tbk. beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia beserta jajarannya,  
Yang kami hormati Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur beserta jajarannya, serta  
Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, serta Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Dirut PT Timah Tbk., Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia dan Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur beserta jajarannya dalam acara rapat dengan pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VII DPR RI pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan RDP dan RDPU dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda:



1. Penjelasan tentang petunjuk teknik penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
2. Dan Lain-lain

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 9 anggota dari 52 anggota Komisi VII, yang terdiri atas 6 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.02 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melakukan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini akan selesai pada pukul 15.00 atau 1 jam setengah setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, apakah dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Perusahaan di Bidang Pertambangan Minerba, kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) telah didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi, termasuk untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengalami kesulitan dalam menerbitkan IPR. Padahal wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2023, salah satu faktornya karena belum jelasnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penerbitan IPR.

Untuk itu melalui RDP/RDPU ini Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan secara detail terkait proses penerbitan IPR dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah provinsi dalam penerbitan IPR, termasuk kendala yang dihadapi badan usaha dalam pemerolehan IPR.



Selanjutnya untuk efektifnya pelaksanaan RDP/RDPU ini kami memberikan kesempatan pertama kepada Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya, pemaparan dan penjelasannya yang kemudian dilanjutkan oleh mitra lainnya secara berurutan.

Kami persilakan, nanti dilanjutkan dengan dari Dirut PT Timah setelah ini, kemudian Pj. Gubernur, kemudian Bupati Belitung Timur, kemudian Bupati Bangka Tengah, kemudian setelah itu dari asosiasi.

Ya kami persilakan Pak Dirjen.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO):**

Terima kasih Pimpinan Rapat.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,  
*Shalom,*  
Om swastiastu,

Yang terhormat Pimpinan Rapat dalam hal ini Pak Dony,  
Yang kami hormati Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir pada siang hari ini,  
Yang kami hormati Direktur Utama PT Timah, Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur, serta  
Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu amanah konstitusi yaitu rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan agenda, yang pertama penjelasan tentang petunjuk teknis penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta yang lain-lain nanti muncul kemudian.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Pada pembahasan hari ini akan kami sampaikan terkait dengan ketentuan wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan izin pertambangan rakyat atau IPR. Di mana yang menjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:

- Ketentuan terkait wilayah pertambangan rakyat atau WPR, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 20 dan Pasal 24, yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 22 dan Pasal 22 huruf a.



- Sedangkan ketentuan mengenai izin pertambangan rakyat atau IPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 73 sebagaimana terlihat dalam paparan.
- Ketentuan selanjutnya menjadi acuan terkait WPR dan IPR adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 96 Tahun 2021 dalam Pasal 65 dan Pasal 66.
- Selain itu juga masih ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 dalam Pasal 36 dan Pasal 37, sebagaimana terlihat dalam paparan di atas.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (4), khususnya huruf e. Selanjutnya diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana terlihat dalam paparan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Secara nasional WPR yang telah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar. Adapun untuk IPR yang sudah kita terbitkan sebanyak 82 izin dengan total luas wilayah seluas 62,31 hektar. Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung WPR yang telah ditetapkan ada 123 WPR, dengan total luas sebesar 8.568,35 hektar.

Menteri ESDM telah menandatangani Surat Keputusan tentang Wilayah Pertambangan per provinsi di seluruh Indonesia per 21 April 2022. Usulan wilayah pertambangan rakyat yang diakomodir dalam penetapan WP 2022 hanya yang disertai rekomendasi kesesuaian tata ruang dari bupati setempat. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 Direktorat Jenderal Minerba telah menyusun dokumen pengelolaan WPR di 9 provinsi dengan 270 blok WPR. Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024 ini adalah yang pertama, kami akan melakukan percepatan penetapan dokumen pengelolaan WPR 6 provinsi, yang disusun pada tahun 2023 melalui Kepmen ESDM, 6 provinsi tersebut diantaranya: Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Riau, Maluku dan Sulawesi Tengah.

Kemudian yang kedua, perlu kami dokumen pengelolaan WPR yang telah disusun di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi 3 kabupaten dengan total 36 blok. Yang terdiri dari Kabupaten Bangka Selatan 9 blok, Kabupaten Bangka Tengah 13 blok dan Kabupaten Belitung Timur 14 blok.

Permohonan izin pertambangan rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dalam Pasal 62 terkait pemohon IPR. Selanjutnya dalam Pasal 63 terkait persyaratan yang harus dipenuhi pemohon IPR dan dalam Pasal 64 terkait jangka waktu IPR yang sebagaimana terlihat di dalam paparan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.



Berdasarkan Surat Edaran dari BKPM/Kementerian Investasi Nomor 428 B poin 1/A8 2023 tanggal 21 Desember 2023 bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan IPR sudah tersedia di OSS dan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Demikian penjelasan kami pada rapat dengar pendapat pada siang hari ini, selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VII yang hadir pada hari ini.

Terima kasih.

*Wabillahitaufiq wal hidayah,  
wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan dilanjut dari PT Timah.

**DIRUT PT TIMAH TBK (AHMAD DANI VIRSAL):**

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang terhormat,

Yang kami hormati Bapak Pj. Gubernur, Bapak Dirjen Minerba, Bapak Bupati Beltim dan Bapak Bupati Bangka Tengah, serta Pengurus Asosiasi Eksportir Timah Indonesia serta rekan-rekan semua dari Belitung Timur dan rekan-rekan PT Timah yang hadir bersama kita hari ini.

Terima kasih atas kesempatannya.

*Next*, kami akan menyampaikan alur program kemitraan dengan masyarakat yang sedang berlangsung di PT Timah saat ini. Lanjut ya, jadi seperti kita pahami bahwa PT Timah merupakan perusahaan pertimahan terintegrasi dari awal kegiatan eksplorasi, baik di darat maupun laut, terus ada kegiatan penambangan, pengolahan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Izin Pak, ini Anggota *nggak* dapat bahannya Pak ya, bahan presentasinya kita belum dikasih.

**DIRUT PT TIMAH TBK (AHMAD DANI VIRSAL):**

Mohon maaf Pimpinan, semula tidak terinfo untuk apa namanya paparan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, nanti tolong di-*share* aja ke kita.

Silakan dilanjut.

**DIRUT PT TIMAH TBK (AHMAD DANI VIRSAL):**

Iya, terima kasih.

Jadi kita lanjutkan dari kegiatan integrasi, dari kegiatan eksplorasi sampai ke pemurnian produk yang kita hasilkan di Bangka. Jadi setelah kegiatan penambangan dilakukan kita juga melakukan kegiatan reklamasi, baik di laut maupun di darat.

Lanjut, ya ini alur bagaimana proses kemitraan yang kita lakukan saat ini, bagaimana kegiatan penambangan timah aluvial bersama masyarakat. Jadi dari kelompok masyarakat atau perusahaan mengajukan permohonan biasanya kemitraan dan kita akan verifikasi seluruh dokumen serta peralatan yang dimiliki, sehingga bisa kita lakukan sesuaikan dengan lokasi yang diperuntukkan untuk dilakukan kegiatan penambangan dan kita lakukan perikatan surat perjanjian.

Kemudian untuk setiap lokasi kita akan terbitkan namanya SPK, jadi Surat Perintah Kerja di lokasi-lokasi yang sudah kita lakukan survei sesuai dengan permintaan masyarakat. Begitu juga kegiatan perpanjangan biasanya kita akan lakukan registrasi, usulan perpanjangan dari masyarakat atau perusahaan dan kita akan verifikasi dokumen kelengkapan dokumen yang masih berlaku dan kita akan terbitkan perpanjangan SP maupun SPK-nya. Ini sudah berbasis teknologi atau kita gunakan *approval* berdasarkan teknologi informasi.

Lanjut, demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

*Billahittaufik wal hidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**



*Wa'alaikumsalam.*

Silakan dilanjut Pak Gubernur, silakan Pak.

**PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (SAFRIZAL):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII dan para Anggota,  
Yang kami hormati Dirjen Minerba, Direktur PT Timah, Bupati Belitung Timur dan Bupati Bangka Tengah, serta Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Izinkan kami melaporkan perkembangan tentang penerbitan Izin Pertambangan Rakyat, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Minerba. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi ganjalan yang kiranya dapat direkomendasikan dalam rapat ini untuk diambil kebijakan atau keputusan. Tadi sudah dijelaskan kalau bisa dibantu bahannya, silakan.

Tadi sudah dijelaskan tentang dasar-dasar hukum dan tata cara penerbitan IPR dan juga Kementerian ESDM Dirjen Minerba juga sudah menetapkan beberapa WPR yang sudah siap, hanya beberapa hal yang masih belum ada. Yang pertama adalah dokumen pendukung terutama dokumen pengelolaan WPR dan dokumen lingkungan, sementara untuk permohonan IPR dalam konsep orang perorang dengan luas maksimal 5 hektar dan koperasi luas maksimal itu adalah 10 hektar dan setelah terbit IPR maka 3 bulan itu harus sudah melakukan penambangan.

Namun ada beberapa hal soal yang kiranya dapat di *endorse* oleh Kementerian Minerba agar proses ini bisa diwujudkan secara cepat. Terus terang secara psikologi kami di pemerintahan daerah ini inginnya cepat karena melihat penurunan ekspor yang luar biasa turun tajam, bahkan di Januari itu nol ekspor, juga ekonomi masyarakat juga sekarang terkoreksi sangat dalam, sehingga ini perlu didorong. Sehingga kami perlu diberikan penguatan di dalam menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Proses Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat ini.

Beberapa hal soal yang harus dipecahkan diantaranya, pertama soal lingkungan. Ini yang belum putus ya yaitu dokumen lingkungan ini bentuknya seperti apa, tadi kita sudah diskusi siapa yang memutuskan bentuk dokumen izin lingkungan, atau kemudian inisiasi penyusunan dokumen lingkungan yang harus dari pemrakarsa yaitu pemegang IPR atau calon pemegang IPR. Apakah perlu ada izin prinsip sebagaimana penyusunan dokumen lingkungan yang lain sebagai dasar dalam penyusunan dokumen lingkungan, termasuk di dalamnya adalah substansi reklamasi dan pasca tambang.



Kita ketahui bahwa hari ini di Bangka Belitung 167.000 hektar lahan kritis dan 60%-nya berada di luar IUP dan 40%-nya di dalam IUP. Ini juga menutup lahan kritis ini butuh biaya yang cukup besar, terutama yang tidak ada Jamreknya atau jaminan reklamasi. Nah untuk pertambangan rakyat ini seperti apa jaminan reklamasi untuk menjamin, walaupun nanti tingkat desa atau lokasi masyarakat setempat tapi juga harus ada regulasi yang kita tetapkan mengenai mekanisme jaminan reklamasi atau jaminan pasca tambang.

Kemudian juga soal yang lain adalah soal pencadangan, ini soal pencadangan adalah soal pertama soal validitas data. Di mana para calon pemegang IPR belum memiliki data valid dari cadangan yang ada di wilayah pertambangan rakyat ini, yang *existing* maupun yang diusulkan menjadi WPR bagi peminat yang bekerja disebut, apakah perorangan maupun koperasi. Sekaligus perlu pengaturan mengenai sumber dana dalam melakukan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.

Tentu pertambangan rakyat ini kita maksudkan adalah memberikan kesempatan rakyat kalau lihat dari bentuknya yaitu perorangan dan masyarakat setempat tentu inilah dengan modal rendah. Oleh karenanya soal modal kegiatan ini perlu kita buat aturan, jika tidak maka nanti kembali mengulang kesalahan yang sama menggandeng bisnis besar lagi, kemudian yang terjadi adalah produksinya ke mana-mana.

Kemudian juga mengenai hasil produksi yaitu mekanisme atau pola pengambilan bijih dari pemegang IPR, termasuk kerjasama antara pemegang IPR dengan pemegang IUP yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemulihan pemurnian atau *smelter*, atau pemegang izin usaha industri. Ini setelah ada produksi dalam wilayah pertambangan rakyat bawa ke mana? Ini yang terjadi sekarang penertiban hukum karena pertambangan itu tidak bisa diprediksi larinya ke mana, sehingga timbul kerugian yang besar. Oleh karenanya perlu pengaturan yang cukup kuat hasil produksi dari pertambangan rakyat ini ke mana arahnya, apakah ke PT Timah atau ke *smelter-smelter* swasta yang ada dan seperti apa regulasinya.

Keempat kemudian pengawasan untuk pertambangan rakyat, pertama kami tidak memiliki yang namanya inspektur tambang. Inspektur tambang ada di Kementerian Minerba, siapa yang harus mengawasi pertambangan rakyat ini? Kalau misalnya kami harus mengawasi, tentu kami harus memiliki inspektur tambang yang bersertifikat dan untuk mendidiknya juga membutuhkan waktu dan biaya. Serta selanjutnya adalah penegakan hukum, kalau tadi ditetapkan misalnya WPR-nya 36 maka sekurang-kurangnya pengawasan di 36 WPR yang ditentukan.

Oleh karena itu Pak Pimpinan dan para Anggota, kami membutuhkan petunjuk teknis agar kami memiliki cantolan atau pegangan yang kuat sebelum menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai ini. Kalau tidak, mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun dari sekarang kami akan kembali bertemu dengan penegakan hukum karena pengaturan yang tidak cukup dan harus bertanggung jawab, mungkin kita sudah kemana dan harus bertanggung jawab terhadap sesuatu



yang kita tidak bisa prediksi. Oleh karenanya kami mengharapkan petunjuk teknis mengenai beberapa soal yang kami sebutkan sebelumnya.

Kiranya nanti bisa diperdalam kembali dalam diskusi Bapak Pimpinan, kami cukupkan sampai di sini. Harapan kami masyarakat Bangka Belitung penambangan timah yang melibatkan rakyat agar bisa dimulai kembali agar rakyat hidup kembali, terutama yang bekerja di sektor pertambangan.

Terima kasih banyak.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Silakan dilanjut Bupati Belitung Timur, silakan Pak.

**BUPATI BELITUNG TIMUR (BURHANUDIN):**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi semua,

Yang kami hormati Pimpinan Rapat,  
Yang terhormat para Anggota Komisi VII,  
Yang kami hormati Pj. Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dirut PT Timah,  
Yang kami hormati Bapak Dirjen Minerba,  
Hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya kami sampaikan kepada pimpinan rapat bahwasanya saat ini kondisi ekonomi di kabupaten kami Belitung Timur itu seperti kota mati, Pak. Artinya saat ini produk ekonomi kami tidak bergerak karena masyarakat penambang yang saat ini, yang kemarin-kemarin mereka *men-support* dan hidup dari tambang rakyat justru saat ini daya beli masyarakat itu tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan keluhan bahwasanya jangka pendek saat ini yang kami butuhkan adalah bagaimana tambang timah-timah rakyat saat ini bisa dibeli Pak, ada yang nampung. Sementara PT Timah hanya menampung timah-timah rakyat dalam IUP PT Timah dan itupun sangat terbatas, sangat terbatas. Namun rakyat menjerit dikarenakan luas wilayah kami cukup luas karena IUP PT Timah di Belitung Timur sangat luas sekali, darat dan lautnya. Namun kondisi *existing* yang ada saat ini rakyat menjerit tidak bisa untuk menjual timah.

Oleh karena itu jangka pendek kami mohon saran dan petunjuk dari yang terhormat Bapak Komisi VII DPR dan Pak Dirjen Minerba, serta Bapak Pj.



Gubernur menjelang Hari Raya Idul Fitri ini masyarakat kami diberikan ruang, diberikan ruang untuk mereka bisa menjual pasir timah mereka agar roda ekonomi bisa hidup kembali.

Mengenai jangka menengah bagaimana izin IPR bisa diterbitkan dan bagaimana regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Pemprov sebagai kewenangan itu kami menunggu karena kami sejak tahun 2022, tanggal 28 September kami telah mengusulkan wilayah pertambangan rakyat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor 600/05/478 DisPUTR/2022 dan ada penambahan luas WPR kami dan kami terbesar 14 blok, kalau dapat laporan dari Pak Dirjen Minerba tadi.

Karena itu WPR adalah salah satu solusi bagi rakyat di Belitung Timur agar mereka bisa selamat dari penambangan-penambangan rakyat, dari terutama penangkapan-penangkapan aparat penegak hukum karena itu dari WPR pasti turun ke IPR. Nah IPR-nya ini sampai dengan hari ini tidak jelas dan itu mengambang, sehingga ketidakjelasan tersebut akhirnya menimbulkan implikasi hukum dan tetap rakyat akan menjadi korban.

Nah oleh karena itulah kami berharap dalam kesempatan ini jangka pendeknya harus diberikan kepada kami di Bangka Belitung, jangka pendek yang diberikan kepada kami di Bangka Belitung. Kalau menunggu proses hukum atau proses administrasi legalitasnya yang diberikan oleh Kementerian ESDM maupun dari Provinsi Bangka Belitung, kami yakin bahwa kondisi Bangka Belitung khususnya di Pulau Belitung, *wabil* khusus lagi di Belitung Timur yang memang masyarakatnya bergantung dengan satu tambang, ini akan menjadi malapetaka.

Nah karena itu Bapak Pimpinan yang kami hormati, sekali lagi saya tidak akan berpanjang karena memang kondisi *existing* saat ini memang timah masih menjadi primadona masyarakat kami di Belitung Timur. Itu baru daratnya, lautnya pun belum terjamah sama sekali. Konon kabarnya dari Dirut PT Timah bahwa deposit timah di Belitung Timur itu mencapai 271 triliun, *wallahu'alam bissawab*.

Itu tambang lautnya yang belum tergarap sama sekali, tapi sebatas tidak ada regulasi yang memberikan keamanan kepada rakyat kami, kami mohon maaf karena rakyat kami butuh kehidupan. Dalam jangka pendek saja saat ini Belitung Timur kota mati, walaupun secara nasional kami mampu **masih menekan** inflasi daerah, daerah kami masih rendah dalam inflasinya tetapi nilai beli rakyatnya juga lemah, karena uang tidak berputar.

Nah karena itu sekali lagi Bapak-bapak sekalian, ini kami sampaikan saja.

Terima kasih, mohon maaf.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Silakan dari Bangka Tengah, silakan Bapak Bupati.

**BUPATI BANGKA TENGAH (ALGAFRY RAHMAN):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirohmanirohim,*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta Anggota,

Yang saya hormati Bapak Dirjen Minerba, Pj. Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Direktur PT Timah, Bupati Belitung Timur dan Sekber Ormas Peltim.

Izinkan saya Pak Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyampaikan, pada prinsipnya semua kondisi yang sama terjadi apa yang telah tadi disebutkan dari awal, termasuk yang terakhir Bupati Beltim. Tetapi saya ingin menyampaikan sedikit kalau di Bangka Tengah itu memang kondisinya agak berbeda dengan Belitung Timur karena kami ini sebelum itu ada punya IUP tersendiri dimiliki oleh perusahaan swasta yang namanya PT Kobatin, Pak.

PT Kobatin ini sudah lama tidak diperpanjang oleh pemerintah RI di tahun 2013, tetapi meninggalkan X lahan-lahan yang sedikit banyak itu masih menjadi idola masyarakat saya ya. Sampai hari ini *existing*-nya harapan-harapan masyarakat saya tentang kondisi di lapangan masih bisa untuk menjadi mata pencaharian masyarakat Bangka Tengah, kenapa? Karena dengan lokasi X tambang yang bekas PT Kobatin tersebut saat ini kurang lebih ada 44.000 hektar, memang data *file*-nya kita *nggak* ada, Pak.

Itu seperti tidak bertuan, kami sudah melaporkan kepada Pj. Gubernur termasuk melalui Pj. Gubernur sebelumnya. Terakhir surat kami 10 Januari 2023 kami menyampaikan kalau bisa tadi *slide*-nya dimasukkan, surat kami yang terakhir segala dengan potensi-potensi yang kita punya Pak di sana. Kami punya lahan kami perkirakan diajukan untuk WPR itu kurang lebih 6.545,11 hektar yang kami ajukan kepada Pj. Gubernur pada saat itu tahun 2023. Dengan potensi beragam Pak, mulai dari granit, timah, pasir kuarsa, tanah urug dan tanah liat semuanya itu sudah kami lakukan pengkajian bahwa itu berpotensi untuk kita lakukan.

Nah, kami layangkan surat.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**



Maaf tadi Pak, berapa luas tadi Pak?

**BUPATI BANGKA TENGAH (ALGAFRY RAHMAN):**

Luasnya 6.545,11 hektar Pak, dengan segala potensi yang saya sebutkan tadi. Namun sampai hari ini memang kami mohon maaf tidak ada balasan yang kami peroleh. Nah ini salah satu surat saya yang terakhir yang saya ajukan kepada Pj. Gubernur, awalnya saya mengajukan 7.175 hektar untuk dijadikan wilayah penambangan rakyat WPR tetapi saya masih disambut dengan surat kembali oleh Dirjen Minerba bahwa saya diminta untuk merevisi.

Nah terakhir surat yang saya ajukan tanggal 10 januari 2023 saya mengajukan surat untuk merevisi, yang saya ajukan kurang lebih 6.545 hektar dengan lokasi titik seperti ini potensi-potensinya ada. Namun sampai hari ini kita tidak dapat jawaban Pak, nah saya ingin menyampaikan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII bahwa saat ini Bangka Tengah itu sangat membutuhkan Pak, bantuan, dukungan, bagaimana mengatur regulasi supaya masyarakat saya bisa memanfaatkan potensi yang ada itu untuk kesejahteraan mereka.

Saya dilantik jadi Bupati tugasnya diberikan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi saya tidak punya kewenangan, ini maka keterbatasan saya. Selaku Bupati saya untuk wilayah pertambangan tidak punya kemampuan apa-apa, yang ada di pusat, walaupun ada pendelegasian seperti tadi untuk gubernur juga sampai hari ini tak bisa lah untuk menyelesaikan persoalan itu. IPR walaupun undang-undang sudah ada Pak, dari tahun 2020 yang terbaru menunjukkan bagaimana syarat, bagaimana cara tapi aplikasi sampai hari ini tidak ada yang diatur oleh Dirjen ESDM, apa yang harus dibuat.

Mohon maaf saya terakhir ke Dirjen ESDM juga mempertanyakan persoalan-persoalan yang lain tentang timah ini tidak ada sedikitpun program yang diberikan oleh ESDM berkaitan dengan apa yang ada di dalam undang-undang ini, Pak. Jangankan kita berbicara untuk melaksanakan IPR, programnya saja tidak punya, padahal undang-undangnya ada.

Buat kami sebenarnya itu arahnya kemana ini, ini Pak, jadi sekali lagi kiranya mohon Pak, Komisi VII sekira apa yang disampaikan teman-teman termasuk Bupati Beltim bahwa kondisi masyarakat kami perlu diberikan regulasi yang jelas Pak tentang tata kelola timah ini karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami. Kalau tidak Pak, saya baca di media terjadi hari ini beberapa yang lalu penyelundupan terhadap timah yang telah terjadi, karena apa? Karena untuk izin ekspor kita tidak bisa lagi. Masyarakat saya mau makan, tidak ada lagi dan idola masih seperti itu.

Mohon kiranya Bapak-Ibu yang hadir di sini untuk sama-sama kita mencari jalan terbaik untuk masyarakat kami di Bangka Belitung dan khususnya di Bangka Tengah.



Demikian, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Selanjutnya ini dari asosiasi tapi tidak hadir, dari wakil dari Ormas mungkin ya tadi ya mungkin ada yang mau disampaikan dari Asosiasi Eksportir Timah tidak hadir, tapi dari Ormas ada.

Silakan kalau mau memberikan masukan, terima kasih.

**SEKBER ORMAS BELITUNG TIMUR:**

Terima kasih.

Melayang serindit di atas pematang,  
Merubah berkicau di ujung muara,  
Pemanis kata kami telah diundang,  
Awal *bismillah* pembuka acara.

*Bismillahirohmanirohim,*  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang menjelang sore,  
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Rapat RDP Komisi VII DPR RI,  
Yang terhormat Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang terhormat Dirjen Minerba,  
Yang terhormat Direktur Utama PT Timah,  
Yang terhormat Pj. Gubernur Babel,  
Yang terhormat Bupati Belitung Timur,  
Yang kami hormati Bupati Bangka Tengah, dan  
Yang kami hormati dan kami banggakan semua hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Mohon izin Pak Pimpinan bahwa kami Sekber Ormas Belitung Timur ini terdiri dari 13 organisasi massa yang ada di Belitung Timur, antara lain Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Asosiasi Pelaku Tambang Inkonvensional (Aspedi), Asosiasi Penambang Rakyat Daerah (Astrada), Aliansi Masyarakat Penambang Kelapa Kampit (AMPK), Forum Hukum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup (FHKPLH) Beltim, Markas Cabang Tembaga Merah Putih Indonesia, LSM Sahabat Berlian, Masyarakat Sadar Wisata, LSM Pemuda Mandiri Peduli Republik Indonesia, Barisan Relawan Cinta Tanah Air (Bareta), LSM Bangkit Belitung Timur, Laskar Anti Korupsi



Indonesia (Laki) dan Tim Reaksi Cepat BP-PAN, Badan Penelitian Aset Negara. Jadi itu rombongan kami Bapak Pimpinan atau dan Bapak-bapak Anggota Komisi VII.

Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi VII DPR RI, khususnya Bapak Bambang Patijaya wakil kami dari Bangka Belitung yang telah mengagendakan kami acara ini, Pak. Jadi kami lanjutkan Pak, sejak 14 Maret 2023 yang lalu itu WPR sudah ditetapkan dan kami disini mewakili aspirasi rakyat menyatakan bahwa kami sudah berkali-kali mengajukan izin pertambangan rakyat dan seperti yang diceritakan dari Bapak-bapak sebelumnya bahwa persoalannya terkait IPR ini tidak bisa dimunculkan.

Itu pernah beberapa upaya-upaya yang telah kami lakukan antara lain audiensi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan RDP dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung, hingga kami juga koordinasi dengan konsultasi ke Dinas Pertambangan di Provinsi Bangka Belitung yang emang pada dasarnya semua seperti yang disampaikan dari Pj. Gubernur tadi Pak terkait dengan Juknis yang sampai saat ini masih belum begitu kita ketahui bagaimana caranya supaya IPR, Pak.

Dan kami kembali Pak menyampaikan bahwa benar sekali apa yang dikatakan dari Bapak Bupati Belitung Timur Pak, kondisi kami penambang yang di Belitung Timur pada saat ini, itu benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas dan berdampak sangat signifikan dengan perekonomian di Belitung Timur, Pak.

Jadi izin Pimpinan, mungkin tanpa panjang lebar kami ingin membacakan beberapa aspirasi yang kami himpun:

Pertama, pertanyaan kami dokumen lingkungan baik itu dalam bentuk AMDAL atau UKL-UPL apakah menjadi persyaratan permohonan IPR atau sebagai dokumen pendukung WPR sebagaimana halnya dengan dokumen pengelolaan WPR. Hal ini erat kaitanya dengan pemrakarsa atau membuat dokumen lingkungan tersebut, apakah pemerintah atau pemohon IPR Pimpinan. Ini pertanyaan kami yang pertama.

Pertanyaan kedua, apakah IPR ini wajib dikerjasamakan dengan IUP OP atau IUPK pengelolaan pemurnian dalam rangka peningkatan nilai jual mineral. Hal ini sangat penting untuk diatur mengingat dari kerjasama antara IPR dan IUP OP, IUPK pengolahan pemurnian ini sebagai solusi dari carut-marutnya tata niaga pertimahan rakyat. Untuk itu peran pemerintah kabupaten sebagai pemilik wilayah sangat penting untuk mendorong kerjasama, terutama dalam mengoptimalkan pembagian BH dana bagi hasil royalti sebagai kabupaten penghasil.

Jadi saya mohon izin Pak, nanti ini instansi mana yang bisa menjelaskan ini kepada kami, Pak. Terus solusi atau kebijakan dari pemerintah sambil menunggu IPR bisa diterbitkan, guna mendorong laju perekonomian Bangka Belitung agar tetap berjalan normal Pak Pimpinan.



Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dulu Pak, sementara ini Pak Pimpinan.

*Billahittaufig wal hidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Sudah cukup mungkin penjelasannya ya, ya betul nih Pak tadi disampaikan dari semua penjelasan yang ada ini karena tidak nyambung apa yang dari pemerintah kepada provinsi. Dalam pelaksanaannya provinsi tidak tahu apa dasarnya untuk melaksanakan itu, kurang lebih *gitu* Pak ya, mungkin ini kurang *misscom* nih Pak Dirjen, nanti mungkin minta tolong dijelaskan tapi sebelum kita masuk ke situ saya mohon teman-teman dari Anggota Komisi VII untuk bisa mendirikan pendalaman dulu, nanti setelah itu baru dijawab oleh apa namanya instansi terkait dalam hal ini tadi yang mungkin yang berhak untuk menjawab dari Dirjen Minerba.

Silakan dari Anggota diawali dari Pak Bambang Patijaya silahkan, ini yang punya dapil nih Pak Bambang Patijaya.

Silakan Pak Bambang.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Apa ya pantunnya belum sempat mikir tadi, nanti aja di ujung penutup.

Baik, Pimpinan yang kami hormati dan Rekan-rekan Komisi VII, Kemudian juga Bapak Plt. Dirjen Minerba beserta jajarannya, Pak direktur juga hadir.

Kemudian Pak Dirut Timah beserta jajarannya ada Dir. Op. juga. Kemudian Bapak Pj. Gubernur beserta jajarannya, kemudian Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, kemudian juga Sekber Ormas Beltim dan semua yang mengikuti acara ini yang tidak bisa kami sapa satu persatu dengan tidak mengurangi hormat kami.

Pimpinan, bahwa memang pertemuan pada hari ini, RDP ini diinisiasi oleh saya yang merupakan buah hasil diskusi dan juga menampung aspirasi dari misalkan Bupati Belitung Timur dan Bupati Bangka Tengah, yang kebetulan merupakan dari Partai Golkar. Dalam diskusi intens ini kita



menyambut, menampung dan mendeteksi bahwa situasi di lapangan itu di Bangka Belitung begitu parah ya, jadi pada hari ini anggaplah misalkan Bupati Belitung Timur mewakili Pulau Belitung dan anggaplah Bupati Bangka Tengah mewakili Pulau Bangka dan seperti itu.

Pada beberapa diskusi sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa pada saat ini terpuruknya ekonomi Bangka Belitung ini bukan, bukan persoalan 1-2 minggu ini, sudah dari 1-2 bulan yang lalu. Misalkan waktu Imlek kemarin diskusi dengan Pak Pj. Gubernur saya sampaikan kepada beliau, waktu itu sempat datang bertamu Imlek ke rumah kita *kan* seperti itu.

Petasan itu, Imlek itu munculnya keluarnya jam 7 malam H-1 Imlek. Hari ini di saat bulan puasa petasan itu *nggak* kedengaran, itu yang anak-anak yang biasanya beli minta uang sama orang tuanya buat beli petasan, *nggak* ada uang buat beli petasan, *nggak* ada, sunyi senyap. Jadi kalau dibilang Pak Bupati Belitung Timur itu apa Belitung Timur kayak kota mati ya bener seperti itu.

Nah saya pikir kesempatan pertemuan kita pada hari ini sangat baik karena dihadiri oleh *stakeholder-stakeholder* penting, di sini ada Plt. Dirjen Minerba, ada Dirut Timah beserta Dir. Op.-nya, kemudian juga Pj. Gubernur dan para bupati. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ekonomi Bangka Belitung sedang tidak baik-baik saja, itu poinnya. Nah kemudian apa sih yang menjadi kendala, kita berbicara di sini poinnya satu komoditas timah sedang tidak baik-baik saja. Ini penyumbang apa produk domestik bruto regional Bangka Belitung yang terbesar.

Saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini bahwa persoalan ini tentu tidak jauh-jauh dari persoalan judul besarnya ya tata niaga pertimahan. Tata niaga pertimahan yang kita inginkan ini seperti apa? Pertama masyarakat bisa bekerja, yang kedua aturan ditegakkan, negara mendapat pemasukan. Yang ketiga, lingkungan terjaga, *kan* itu poinnya.

Pada saat ini kita melihat seperti apa, jangankan para bupati termasuk Dirut Timah pun ada keluhannya di dalam bagaimana operasional, sehingga ini semua belum maksimal. Nah kami berharap Pak Dirjen Minerba hal-hal yang terkait dengan persoalan regulasi dan perizinan kita harus segera uraikan Pak, kita harus segera uraikan. RDP kita minggu kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa Bangka Belitung per, per minggu kemarin itu baru 12 RKAB yang disetujui dan itu terkait dengan kurang lebih sekitar 44.000 ton, itu baru separuh dari tahun 2023 ya *kan*.

Nah kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa gara-gara proses penegakan hukum, lalu kemudian semua drop tapi kami juga mendorong kepada Pak Dirjen Minerba beserta jajarannya, aspek legalitas untuk orang bekerja juga harus dapat harus ada Pak iya *kan* harus ada. Nah jadi kami mendorong agar percepatan untuk penerbitan RKAB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada persoalan-persoalan kendala di dalam penerbitan tersebut dicarikan solusinya, Pak.



Kami melihat misalkan jika masalahnya adalah pada CPI lagi beberapa perusahaan-perusahaan itu, ya silakan dicarikan. Dicarikan solusinya sehingga tidak mandek gara-gara orang satu ini semuanya di-*hold*, kalau di-*hold* ya gimana *gitu* solusinya apa? Kan harus ada solusinya *gitu*.

Lalu kemudian juga untuk operasi PT Timah misalnya, kami mendorong Pak. Misalkan PT Timah ada pengajuan perluasan IUP dan sebagainya misalkan di Bangka Barat itu, itu kabarnya pengusulannya sudah lama itu nah tapi masih jalan di tempat. Kami juga mendorong karena kenapa? Jika misalkan IUP yang diperluas tersebut disetujui, ini masyarakat bisa langsung bekerja di situ, Pak.

Bisa langsung bekerja dan PT Timah membeli timahnya itu dengan tenang, karena kenapa kita menghadirkan PT Timah di sini *kan* agar mendorong kepada PT Timah agar membeli timah masyarakat yang terutama yang dihasilkan dari IUP-nya sendiri. Kita juga tidak mau misalkan menjebak PT Timah membeli dari masyarakat yang di luar IUP-nya *kan* begitu, tapi jika memang istilah kita kalau di batubara ini *kan* koridor itu. Nah pada kawasan-kawasan koridor itu jangan menjadi kawasan abu-abu, terang-terang saja, terang-terang saja dengan cara apa? Kalau memang itu ada pengajuan perluasan, perluasan silakan.

Nah bagi yang RKAB swasta jika memang sudah harus dikeluarkan, keluarkan saja semua sehingga ekonomi pulih kembali. Nah pada hari ini kita juga kenapa mengundang Bapak Pj. Gubernur? Beliau ini walaupun Pj. perhatiannya kepada ekonomi Bangka Belitung tinggi, tanggung jawabnya tinggi. Nah jadi beliau ini juga tadi dalam keluh-kesahnya sebetulnya peran beliau di dalam mekanisme tata niaga pertimahan ini antara lain di IPR, tapi beliau juga masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu ada beberapa hal yang menjadi hal penting dalam pengelolaan IPR tersebut masih belum jelas. Tadi *kan* beliau menyampaikan, jangan sampai hari ini dikeluarkan IPR-nya nanti beliau bermasalah seperti itu. Nah kita berharap semua ini bisa teruraikan.

Nah, dengan demikian kita bisa mengakselerasikan situasi ini, kalau bahasa saya mudah-mudahan ini bisa diliput oleh media nasional, saya mendesak dan saya menyampaikan sudahlah kita relaksasi saja kembali seperti tahun 2021. 2021 ekonomi Bangka Belitung melesat ketika ada relaksasi itu semua bekerja iya *kan*, tapi tentunya tidak euforia, tetap terkendali ya.

Kami memberikan apresiasi kepada Polda yang juga tidak membiarkan situasi ini *chaos* juga *kan* seperti itu. Pak Dirjen salah satu dan pimpinan salah satu efek dari pada situasi yang tidak menentu ini terjadi penyelundupan yang mulai marak. Polda sudah melakukan penindakan, nah kita tidak berharap situasi ini berlarut-larut jadi dengan misalkan apa peran PT Timah yang lebih optimal ya *kan*, kemudian juga IPR ini diberikan dikeluarkan perizinannya, kemudian RKAB swasta dikeluarkan secepatnya tentu ini akan lebih mengakselerasikan ekonomi.



Kami pada saat ini ekonomi terjun bebas, saya sudah sampaikan pada RDP yang sebelumnya ya dari Desember 2023 menuju Januari 2024 itu betul-betul terjun bebas. Tadi Pak Pj. mengatakan tidak ada ekspor Pak, nol ya artinya eksportir timahnya nol dan itu berkontribusi kepada 82% ekspor Bangka Belitung ya, jadi anjlok habis-habisan *gitu*.

Jadi ini saya pikir kita perlu, perlu menyadari bahwa saya pikir di antara semua itu kepentingan masyarakat itu juga adalah penting, seperti disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah kita ini *kan* hadir di sini semuanya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah jadi ada beberapa hal saya pikir ya, pertama masyarakat mendapat penghidupan, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kembali kepada masyarakat, satu.

Yang kedua, aturan ditegakkan dan negara mendapatkan pendapatan. Dalam hal ini Pak Dirjen saya kembali tegaskan, kita ini dulu berbuih-buih pada tahun 2022 ketika Pak Dirjen Ridwan Djamiluddin. Konsepsi tentang bagaimana penerimaan negara itu ditingkatkan dengan misalkan peningkatan royalti, *kan* seperti itu. Jadi sampai sekarang ini *nggak* jelas nih padahal kita ini sudah *sunset (53.38)* bisnis, udah di ujung seperti ini.

Lalu ketika misalkan kita memberikan relaksasi, lalu pendapatan negara seperti apa, *kan* mesti ada kejelasan. Ini jangan ragu-ragu lagi, kalau memang sudah ada kajian tentang peningkatan royalti yang katanya progresif tersebut itu segera disahkan saja. Sehingga ini menjadi apa namanya bahasa saya pada waktu itu *everybody happy*, negara *happy*, masyarakat juga *happy*, semua bisa bekerja.

Kemudian saya pikir kita juga perlu inovasi perpajakan atau inovasi PNBPN, ini *kan* yang selalu dipungut itu selalu di ujung di *smelter* ketiga atau pemilik IUP ketika mereka melakukan ekspor. Saya selalu mengatakan kenapa di tengah ketika produknya masih pasir timah itu dipungut PNBPN, kita ini mengingkari ada yang namanya kolektor.

Sudahlah memang dia ada kok dalam ekosistemnya, ada dia, kalau di PT Timah itu mitra, kalau di swasta namanya kolektor. Memang ada pungut saja PNBPN di situ ya, sehingga kita bisa maksimal pendapatan negara, pasir timahnya menjadi objek PNBPN, ketika hasil lebur balok timahnya pun menjadi objek PNBPN, *nggak* ada masalah, negara semua bisa maksimal mendapat pendapatan.

Lalu kemudian Bupati Bangka Tengah ini juga menyampaikan keluhan-kesahnya karena saya beerapa kali mengajak beliau menghadap kepada Dirjen Minerba yang lama. Kami ketemu kira-kira bagaimana pemanfaatan terhadap WPN wilayah perdagangan negara *ex* Kobatin. Nah kami juga tahu *ex* Kobatin itu mereka juga misalkan punya jaminan reklamasi yang ditahan waktu itu ya, ada di tangani oleh Kementerian ESDM.

Usulan-usulan pada saat itu diterima tapi pada akhirnya *nggak* berjalan juga, ternyata Jamrek yang dulu diberikan oleh PT Kobatin pada saat itu *nggak* tahu lagi ke mana uangnya. Akhirnya ya orang Koba juga *nggak* mendapatkan apapun juga, begitu Pak Bupati ya. Itu kami lakukan tahun 2021 kalau tidak salah begitu ya kita menghadap Pak Ridwan Djamaluddin direktur anunya waktu itu masih Ibu Lana kalau tidak salah, dirteknya, Bapak Sugeng juga sempat kita bicara.

Nah jadi apa yang terjadi di Bangka Belitung pada akhirnya kalau kita abai *nggak* ada manfaat langsung kepada masyarakat. Kami melihat informasi yang disampaikan misalkan dari Pj. Bupati, Pj. Gubernur ya ada paparannya itu. Besaran royalti yang diterima Bangka Belitung, *nggak* besar Pak 1 tahun itu cuma sekian kecil lah. Nah ini waktunya sudah, sudah di ujung kita kalau bilang mau 2-3 tahun lagi baru kita tingkatkan royaltinya, bukan di masa yang akan datang kita ingin memanfaatkan itu pada saat ini Pak Dirjen.

Jadi saya pikir banyak ini yang, yang saya sampaikan, memang tidak bisa semuanya bisa kita, kita keluarkan dan kita selesaikan di sini. Paling tidak masalah-masalah inilah yang harus kita segera atasi, saya menyampaikan kepada semua pihak yuk udah lah relaksasi aja. Sehingga ekonomi bisa pulih tetapi tentunya kita tidak menginginkan adanya euforia yang berlebihan, sehingga kemudian malah ada sisi-sisi yang lain yang, yang kurang positif yang malah muncul daripada relaksasi tersebut.

Kita berharap dengan adanya relaksasi tersebut, PT Timah bisa cepat pulih ya *kan*, Dirjen Minerba juga mengakses ini semua, PJ Gubernur juga *happy* ekonomi tumbuh, kemudian para bupati juga *happy* semua tumbuh, masyarakat juga bisa bekerja. Ini kalau *nggak* kawan-kawan Sekber Ormas ini pening kepalanya, karena kenapa? Harapannya banyak, mereka juga mewakili masyarakat. Betul ya, seperti itu.

Saya pikir demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan, atas waktu dan kesempatannya saya sampaikan terima kasih.

*Sungguhlah semak* padang ilalang,  
Tak *kan* habis *dibabat bersih*  
Omongan saya tak perlu panjang,  
Saya kira sekian dan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera kita semua.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*



Terima kasih, wah panjang lebar nih oleh yang punya Dapil kalau udah tahu sekali kondisi.

Ya, jelas yang disampaikan oleh Pak Bambang Patijaya, *kan* yang kita pikirin jangan polemik yang ada di atas jadi akhirnya mengorbankan rakyat yang ada di Bangka Belitung. Ini yang kondisi yang ada hari ini ya, itu yang kita ingin selesaikan supaya rakyat juga jadi tidak sengsara seperti hari ini, kurang lebih *gitu* Pak ya, setuju ya.

Ada lagi yang lain? *Oke*, Pak Willy silakan, setelah itu Moreno silakan.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Ya, terima kasih.

Pak Ketua dan Pimpinan Komisi VII dan seluruh Anggota, dan juga Pak Dirjen Minerba dan jajarannya, Pj. Gubernur, para bupati dan semua kita yang hadir.

Saya Willy Midel Yoseph Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari wilayah atau daerah pemilihannya Kalimantan Tengah. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Pj. Gubernur dan para bupati tadi saya maklumi karena memang kami dari Komisi VII udah berkali-kali datang ke sana dan juga melihat secara langsung kondisi dan keadaan.

Jadi saya sangat memahami apa yang telah disampaikan dan apalagi karena Pak Bambang Patijaya beliau betul-betul putra terbaik yang ada di sana dan begitu saya melihat ini adalah inisiasi beliau untuk membantu pertemuan ini, untuk membantu masyarakat di sana saya melihat ini memang pas sekali gitu.

Apalagi kemarin tanggal 14 Februari ya Pemilu ya, pemilu legislatif itu rakyat dari Bangka Belitung itu tidak salah gitu memilih beliau untuk kembali lagi ke sini ya dan ini sesuatu hal yang menurut saya pasti beliau akan terus berjuang untuk rakyat dan pemerintah yang ada di sana.

Nah dari apa yang diuraikan tadi ya saya tidak berani melebihi menurut saya itu, itu udah sesuatu hal yang real, ya kami tentu sangat mendukung sekali agar nanti pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian ESDM yang juga yang terkait dan tentu juga melalui Pak Dirjen yang hadir pada saat ini ya, aspirasi yang disampaikan ini apalagi saya lihat tadi sampai Sekber Ormas aja itu sudah artinya itu sudah wakil-wakil rakyat ya. Ya tinggal bagaimana nanti kita membicarakan ya apa yang menjadi aspirasi ini, ini bisa terealisasi tetapi menjadi catatan kita juga bahwa yang namanya ilegal tentu juga sangat banyak merugikan bangsa, dan tentu juga negara, dan masyarakat itu sendiri ya.

Memang kita melihat ekonomisnya tetapi kita tidak melihat jangka panjangnya, maka oleh karena itu undang-undang mengatur segala sesuatunya itu, ya agar daerah ini lebih baik, masyarakat juga lebih merasa kenyamanan dan kesejahteraan tetapi kedua masalah dan pertimbangan ini



juga menjadi pertimbangan kita, ya sebagai anak bangsa, berbangsa dan bernegara.

Nah maka oleh karena itu di forum yang terhormat ini kembali saya menyampaikan memberikan apresiasi kepada saudara kami Pak Bambang Patijaya dan tentu juga yang mewakili pemerintah Bangka Belitung Pak Pj. Gubernur dan para bupati dan rombongan ya yang sudah mau menyampaikan aspirasi ini untuk minta agar bagaimana negara untuk bisa mempertimbangkan, agar apa yang menjadi permasalahan dan ingin keluar dari permasalahan itu bisa kita selesaikan hari ini.

Maka oleh karena itu saya tidak banyak yang saya sampaikan karena di wilayah saya sendiri juga ilegal *mining* ini juga luar biasa Pak Pj. Gubernur karena di tempat saya ada emas ya, kemudian juga batubara dan ilegal juga *gitu* ya. Nah Oleh karena itu carut-marut negara ini memang harus ada yang ngurusnya, harapan kita ya kalau memang nanti 02 ini memimpin kita, harapan kita mampu menguraikan semua permasalahan ini, sehingga 01 dan 03 kita bersatu untuk membuat Indonesia lebih baik.

Mungkin itu dari saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Willy.  
Silakan Pak Moreno.

**F-GERINDRA (MORENO SOEPRAPTO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya pikir rapatnya sore ini masih kering ini mulutnya puasa, *alhamdulillah*.

Yang saya hormati Pimpinan serta Anggota Komisi VII dan juga Dirjen Minerba beserta jajarannya, Dirjen Minerba beserta jajarannya, juga Pj. Gubernur Bangka Belitung, Pak Bupati dari Belitung Timur, Bupati kabupaten Bangka Tengah, teman-teman Sekber Ormas dan juga Dirut PT Timah beserta tim.

Mungkin saya sedikit cerita ya beberapa kita punya gelaran kejuaraan dunia otomotif, itu setelah balapan dan sebelum balapan itu mereka *nggak* ke Lombok, mereka datangnya ke Bangka nyasar Pak Gubernur, nyasar. Nyasar dalam hati maunya ke Belitung, tapi ke Bangka, mereka *nggak* tahu. Dia bilang Moreno ini pas kita mau mendarat, kita udah mau lompat aja rasanya karena banyak banget kolam-kolam, disangkanya kolam buat bisa berenang Pak.



Saya bilang *hei* itu bukan kolam, itu ya, saya juga mau gimana, itu bangsa kita tapi faktanya adalah akhirnya ke Belitung, akhirnya ke Belitung, *top* dia bilang untuk pariwisata.

Yang perlu saya tekankan disini adalah pertama LME, LME kita timah, komoditas timah ini posisinya sekarang tinggi, betul ya. Nah ini yang mesti kita waspadai teman-teman semuanya, kenapa? Karena dunia otomotif itu komponen yang terkecil tapi menentukan *chip otomotif* ada timah. Jadi Bapak-bapak yang **(tidak ada suara 1.05.04-1.05.15)**

*Market*-nya masuk lagi ke Indonesia tapi komponen itu ada dari tempatnya Pak Bambang beserta teman-teman semuanya dari sini. Jadi ini yang mesti kita waspadai, dalam arti kita waspadai Pak Dirjen, Pak Dirjen ini harus ambil alih Satgas yang dikomandoi selama ini bukan dari Minerba *leading*-nya, harus kembali ke Minerba dan kami di sini Komisi VII sangat mendukung Minerba punya Gakkum agar bisa mengevaluasi RKAB-RKAB yang sudah dilahirkan.

Kembali ke Pak Dirjen, Pak Dirjen RKAB itu ada yang 12. Menurut saya sekalian aja jangan dikeluarkan dulu kalau memang mau dievaluasi, mendingan begitu Pak dan juga dievaluasi PT Timah. PT Timah nanti udah punya wilayah IUP, ada IUP untuk rakyat dijadikan satu aja PT Timah di pengurangan 50%, sisanya dikasih ke masyarakat. Sehingga apa? Tata niaganya, tata kelola itu bisa berjalan Pak.

Selama ini saya dapat informasi Pak, RKAB-nya 12 yang kita lahirkan, yang kita terbitkan oleh wilayah Kementerian ESDM Minerba itu ada 12, 44.000 kurang lebih 44.000 ton, itu menurut saya masih kecil tapi dunia internasional sudah menerima timah dan kita tahu timah itu nomor 2 terbesar dari kita. Berarti apa? Berarti penyelundupan itu jalan Pak ya *kan*.

Jadi ini adalah momentum Pak, maksudnya bukan momentum penyelundup. Momentum untuk kita memberikan sumbangsih untuk negara tapi juga masyarakat Babel bisa menikmati Pak. Nah Pak saya punya usul Pak, ini mesti dicek jangan sampai harga PT Timah itu dikeluarkan, saya *nggak* tahu berapa sekarang harganya. Yang saya dengar tiba-tiba nanti ada lagi pemain-pemain itu mendorong harga bisa beda 50.000-60.000 sama harga PT Timah. Sehingga pada lari semuanya ke swasta, sedangkan PT Timah ini *kan* kakak tertua katanya di situ yang harus didahulukan.

Saya ini harus diatur Pak Dirjen sebelum sambil paralel ya, paralel IPK izin rakyat ini. Kami, saya sangat setuju Pak jadi, karena apa? Jangan sampai yang wilayah bolong-bolong itu dipikir kolam renang itu bisa dikelola Pak, jadi ada ruang untuk pemungutan biaya untuk pasca tambang. Itu bisa bagus wilayah-wilayah di darat ataupun di laut itu dikelola dengan baik setelah tambang.

Saya orang luar dari Bangka Belitung cuman *kan* saya miris aja kalau pembalap-pembalap itu selain ke Bali-Lombok, bisa ke Belitung *kan*



*alhamdulillah* ada pemasukan lebih tapi pemasukan yang pasti dari tambang rakyat itu bisa dikelola. Sehingga pemasukan daerah bisa naik Pak Pj. Gubernur, sekarang pendapatannya berapa dari tambang itu.

Interaktif Pimpinan.

**PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (SAFRIZAL):**

Untuk provinsi per tahun 84 miliar.

**F-GERINDRA (MORENO SOEPRAPTO):**

84 miliar untuk seluas Bangka Belitung bisa mensuplai dunia internasional saya rasa sangat kecil Pak. Jadi saya, saya sih Pak Bambang izin ya, saya sangat mendorong untuk kemajuan Bangka Belitung Pak Bupati, saya tahu betul kebatinan Bapak, masyarakat *nggak* ada petasan, mungkin ibu-ibu jarang ke toko emas sekarang karena *nggak* ada yang bercocok tanam Pak di situ ya, kalau di, *nggak* ada yang beli tapi *kan*. Jadi kalau di dapil saya di Jawa bercocok tanam bisa Pak, lempar beras *insyaallah* masih bisa tumbuh, kalau di sana *kan nggk*, betul Pak.

Jadi Pak Dirjen Pak Tri, saya rasa momentum untuk percepatan RKAB Pak kami mendorong itu dengan catatan, dengan catatan *kan* momentum ini *kan* 3 tahun Pak ke depan, kalau memang dikasih kecil dulu *nggak* apa-apa sambil berjalan evaluasi, tapi sudah bisa ada pemasukan.

Izin penambangan rakyat Pak, saya mendorong untuk bekerjasama dengan PT Timah Pak, daripada *nggak* jelas produksinya ke mana dan ditambah lagi pelajaran yang kemarin-kemarin dan juga harus dikontrol Pak, harganya itu, tata niaganya dengan harga PT Timah sekian, sekarang PT Timah.

Saya sekarang PT Timah saya rasa secara *on paper* untung, tapi produksinya *kan* belum Pak masih nyari sana-sini, betul *nggak* Pak, nah itu dia. Saya sih bukan orang situ Cuma dengar-dengar aja, *running text* yang saya tahu *gitu*.

Jadi itu dari saya, mudah-mudahan bertambah pengunjungnya ke Belitung dan Bangka dan juga bisa dibenahi tata kelola, tata niaganya. Saya yakin Pak Tri setiap hari setiap ketemu di rapat semakin cerah Pak Tri nih, mudah-mudahan pertemuan dan hasil rapat ini bisa membuahkan hasil yang positif bagi bangsa kita.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada lagi yang lain? Pak Hermanto silakan.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Baik.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi VII, Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya, Dirut PT Timah, kemudian Pj. Gubernur Bangka Belitung dan Bupati Bangka Timur, Bangka Tengah, kemudian Sekber Ormas dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini.

Saya Bambang Hermanto Pak namanya sama dengan Pak Bambang, Bambang, Bambang fraksinya sama dari Golkar juga. Dapilnya beda Pak, saya Indramayu.

Jadi dalam kesempatan ini saya kira saya mendukung apa yang telah tadi Bapak-bapak sampaikan ya terutama dari harapan-harapan dari masyarakat Bangka Belitung, yang mana pada kondisi sekarang ini dalam kondisi yang kurang baik begitu *kan*. Oleh karena itu apa yang menjadi harapan masyarakat Bangka Belitung agar supaya apa namanya segera direalisasikan perizinan rakyat begitu *kan*, supaya bisa berproduksi. Saya secara pribadi ini sangat mendukung dan mendorong Dirjen Minerba untuk segera merealisasikan segala bentuk administrasi, supaya masyarakat Bangka Belitung bisa makmur dan sejahtera.

Saya kira demikian Pak dari saya, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Cukup saya pikir sudah, silakan Pak Dirjen, Plt. Dirjen bisa menanggapi dan nanti mungkin terjadi, menurut saya ini akan terjadi diskusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini coba kita mencari titik temunya lah Pak Dirjen.

Silakan.



**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Terima kasih Pak Dony selaku Pimpinan RDP pada siang hari ini.

Selamat datang untuk Pak Sugeng, Pak Eddy yang hadir.

Yang pertama dari Pak Bambang Patijaya, saya juga terima kasih untuk Pak Bambang Patijaya yang telah menginisiasi acara siang hari ini karena wujud sebagai wakil dari Bangka Belitung dan permasalahan timah ini memang ada di daerah Bangka Belitung. Maka sudah sepantasnya Pak Bambang memperjuangkan hal ini, saya sependapat itu Pak.

Pertemuan kita siang hari ini saya berharap ini yang pertama dan mudah-mudahan ini bisa langsung tuntas Pak dan tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Kita selesaikan di mana akar masalahnya sehingga belum terpecahkan, termasuk Bapak sampaikan tadi bahwa WPR sudah diserahkan setahun yang lalu oleh Pak Ridwan Djamaluddin selaku Dirjen Minerba, tapi sampai saat sekarang kok belum terlaksana untuk di lapangannya, ada apa? Nanti kita jawab, Pak.

Kemudian kami sampaikan di sini, Pak Bambang juga menyampaikan masalah situasi Bangka Belitung yang semakin parah, ekonomi terpuruk 1 sampai 2 bulan yang lalu, kemudian tata kelola pertambangan perlu kita perbaiki di sini, Pak. Di mana juga tidak mengesampingkan aspek legalitas harus tetap ada. Terkait dengan masalah RKAB ini juga tadi dikatakan, ditanyakan oleh Pak Moreno RKAB, Pak.

Saya juga mengulangi minggu yang lalu kami juga ada di tempat ini untuk dengar pendapat, saya sampaikan di sini Pak, saat ini kami sangat kooperatif dengan pelaku usaha di bidang pertambangan. Apa yang menjadi pengalaman masa lalu, masa lalu kami, masalah pengeluaran RKAB yang tidak sesuai dengan Permen dan itu dipermasalahkan, sampai hari ini senior kami Pak Ridwan Jamaludin belum selesai juga untuk menghadapi persidangan, belum putus. Dari pengalaman itulah kami yang ada di Minerba ini, saat ini ekstra hati-hati dan teliti Pak, apalagi dengan keluarnya Kepmen 373 Menteri ESDM yang menyangkut masalah perizinan RKAB, kami tidak lepas dari situ.

Oleh karena itu kami mengundang, kami mengajak para pelaku usaha untuk bisa segera melengkapi persyaratan yang ada di dalam Kepmen 373, khususnya untuk perizinan RKAB. Kami tidak ada sedikitpun untuk menahan-menahan, memperlambat, tidak ada. Yang ada dari kami, ayo cepat selesaikan, ayo cepat selesaikan karena kami ini direktorat jenderal yang paling banyak menghasilkan PNBPN Pak ya.

Kalau tidak salah laporan Bapak Menteri minggu yang lalu juga menyampaikan kita penghasil PNBPN terbesar dan mungkin melebihi target perolehan, kita sampai 301 triliun kalau *nggak* salah waktu itu dan Minerba



sebagai ujung tombaknya, Pak. Sehingga kami ingin ada percepatan-percepatan untuk memperlancar RKAB. Oleh karena itu bulan Februari yang lalu ini Pak Direktur Mineral Pak Tri ini langsung mengadakan *coaching clinic* kepada berapa ratus, 800 perusahaan tambang di bidang mineral yang belum bisa menyelesaikan RKAB karena perizinannya.

Kita adakan *coaching*, ada 10 lapak di tempat kami Pak, kita buka lapak di sana, mungkin 1 hari kita bisa 4-5 perusahaan *on the spot* kita jelaskan permasalahannya apa, bagaimana penyelesaiannya, bahkan hingga sampai saat ini sudah 3-4 kali *coaching* ada juga perusahaan yang belum tuntas juga untuk menyelesaikan RKAB-nya.

Padahal kami mengharapkan agar hasil RKAB itu betul-betul valid dan tidak ada komplain hukum di kemudian hari dan ingat Pak kami-kami bekerja sudah saya terapkan pada seluruh anggota, tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi gratifikasi, tidak ada lagi suap dan menyuap ya, betul-betul kita untuk pelaku usaha semuanya.

Kemudian di samping itu juga Pak, tadi dari Pak Bambang juga menyampaikan kita perlu adanya CPI. Mungkin ada CPI-nya terbatas Pak, sehingga si pelaku-pelaku usaha ini untuk, untuk melengkapi RKAB-nya itu harus melalui kompeten person ya, berapa menghitung cadangan dan sebagainya. Sehingga dengan CPI terbatas sehingga agak kesulitan dan CPI sendiri juga bukan dari personil kami, Pak.

Yang berikut kami sependapat tentang PT Timah untuk memperluas IUP-nya Pak, ini sudah lama kami dengan Pak Dirut berbicara. Namun sampai saat hari ini sepertinya ada persyaratan yang belum lengkap ini, kita perlu intensif lagi Pak ya terutama masalah lingkungannya ini Pak. Mungkin lebih intensif lagi Pak Sunindyo, ada yang ingin disampaikan, bisa ada biar kita bisa tuntas semuanya.

#### **DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA (SUNINDYO SURYO HERDADI):**

Izin Pimpinan menambahkan penjelasan Pak Dirjen terkait dengan pengelolaan lingkungan terkait PT Timah.

Saat ini memang kami punya instrumen Inspektur Tambang yang bertugas di Bangka Belitung dan atas dokumen-dokumen persetujuan lingkungan yang sudah dimiliki oleh IUP, itu dasar dari para Inspektur Tambang melakukan pengawasan di lapangan dan tentunya sesuai dengan tata kelola persetujuan dokumen lingkungan tersebut sudah ada juga jaminan yang ditetapkan dan juga ditempatkan oleh pemegang IUP. Sehingga kita harapkan walaupun nantinya IUP saat ini sedang bekerja di lapangan dan tentunya dalam kondisi yang ideal tanpa ada gangguan dari peti itu nanti apabila perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya, kegiatan pemulihan lingkungan itu maka jaminan akan kembali kepada perusahaan tanpa ada potongan sepeserpun daripada pemerintah.



Demikian Pak Dirjen tambahan kami, terima kasih Pak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Baik, terima kasih Pak Nindyo.

Berikutnya nanti mungkin langsung anu Pak ya langsung dengan personilnya PT Antam biar tuntas semuanya, segera memperluas untuk IUP-nya.

Kemudian tadi dari Pak Bupati, barangkali tadi menyinggung masalah ESDM ada beberapa personil ESDM yang belum *(suara tidak jelas 1.19.15)* dan sebagainya. Ini yang dimaksud ESDM yang mana nih, ESDM provinsi atau ESDM pusat?

**BUPATI BANGKA TENGAH (ALGAFRY RAHMAN):**

Yang pusat Pak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Mengenai apa Pak?

**BUPATI BANGKA TENGAH (ALGAFRY RAHMAN):**

Ya tadinya kita berharap bahwa pusat juga punya program yang bisa memberikan kita ruang untuk bagaimana memanfaatkan IPR ini, setidaknya-tidaknya dari Dirjen Minerba misalnya mohon maaf Pak, kami juga diberikan misalnya masing-masing dirjen itu kebiasaan kami di kabupaten kota itu *kan* diberikan program-program Pak, kalau memang ada arahan undang-undangnya tapi sampai hari ini saya selaku bupati mohon maaf, tidak ada bisa melihat apa yang dilakukan oleh Dirjen Minerba terhadap kami misalnya di wilayah Bangka Belitung terhadap aplikasi-aplikasi yang harus kita lakukan di daerah berkaitan dengan penambangan ini.

Seperti contoh Pak misalnya mohon maaf, IPR itu tadi yang kami, kita diskusikan. Walaupun sudah ada undang-undang berapa kali berganti-ganti undang-undang sampai hari ini aplikasi penerapan bagaimana IPR itu berjalan tidak ada, *nggak* bisa Pak sampai hari ini dan kami sebenarnya mengharapkan juga ada program yang dilakukan oleh Dirjen Minerba bagaimana kami masyarakat di bawah tahu, bisa, mampu untuk mengolah itu.

Minimal setidaknya-tidaknya ada program misalnya turun orang dari program aplikasi itu bagaimana kita melaksanakan penambangan yang



lingkungan, bagaimana menambang itu secara regulasi. Ada Pak kajian-kajian yang dilakukan oleh Dirjen Minerba kami sampai turun ke bawah.

Itu Pak harapan kami karena, sekali lagi setahu saya setiap ada undang-undang di masing-masing dirjen itu ada program yang dilakukan untuk supaya turun ke bawah masyarakat tahu dengan program itu, begitu Pak kurang lebih.

Terima kasih.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Bisa kami jawab langsung Pak Pimpinan rapat?

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sedikit saya tengahi ini Pak, ini saya pikir ini, saya sampaikan tadi ini ada *misscom*. Sosialisasi mengenai program yang ada di ESDM tidak sampai kepada masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Jadi maksudnya programnya seperti apa, mungkin begitu Pak Bupati ya, programnya apa. Nah ini tolong bisa dibantu dengan Pak Dirjen dengan timnya untuk mensosialisasikan ke mereka.

Apa yang mereka harus lakukan dengan izin-izin ini kurang lebih *gitu* Pak dan itu juga yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur tadi, ini *blind* mereka nih Pak, nih bingung apa yang mereka harus lakukan dengan situasi ini. Akhirnya apa? Posisi terakhir adalah rakyat yang dirugikan hari ini, rakyat yang tidak apa namanya dia tidak, mereka berpikir menambang hari ini untuk makan hari ini. Nah ini yang kita pikirkan nih dengan kita tidak terkomunikasikan di atas, di bawah yang jadi tidak kondusif di bawah.

Nah ini yang saya pikir kita harus cepat langkah di sini Pak Dirjen, silakan dijawab lagi Pak Dirjen.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Terima kasih Pak Bupati Bangka Tengah.

Baik, Bapak Pimpinan dalam hal ini mungkin Pak Direktur mineral yang sudah sudah mengetahui dari setahun yang lalu masalah WPR, IPR ini.

*Monggo* silakan.

**DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA  
(SUNINDYO SURYO HERDADI):**

Izin Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Anggota dan Bapak-Ibu sekalian.

Izin menambahkan dari penjelasan dari Pak, Pak Plt. menambahkan sedikit. Yang pertama terkait dengan maaf *nggak* urut ya Pak, tapi poin-poinnya mungkin kita, bisa kita sampaikan. Jadi yang pertama terkait dengan RKAB sampai saat ini yang telah dilakukan persetujuan adalah sebanyak 15 perusahaan, itu dengan kapasitas produksi 46.444 jadi ada kenaikan sedikit dari yang apa kemarin.

Itu rata-rata memang sampai saat ini kami masih melakukan *coaching*, bahkan pagi hari ini pun masih kita lakukan *coaching* klinik terhadap beberapa perusahaan yang memang progresnya masih belum, belum bagus kira-kira seperti itu Bapak.

Terus kemudian kalau misalnya kita lihat dari produksi tahun-tahun sebelumnya yang, jadi kalau kita lihat kapasitas produksi dunia itu untuk nikel itu sekitar 290 ribu, untuk Indonesia itu sekitar 70-an ribu. Nah sekarang di kita, di Minerba itu sudah ada persetujuan 46.000, jadi sekitar 60-65% dari kapasitas produksi yang ada di tahun 2023.

Terus kemudian lanjut ke masalah WPR ini Pak, WPR ini asal muasalnya yaitu pertamanya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa semua perizinan ditarik ke pusat. Terus kemudian di Undang-Undang 3 Tahun 2020 terkait dengan IPR itupun juga masuk ke pusat. Nah terus kemudian didelegasikan kewenangannya ke provinsi IPR itu, jadi IPR ini pendelegasian kewenangan di Kementerian ESDM sampai kepada provinsi, demikian Bapak.

Terus, kemudian terkait dengan WPR induk asalnya WPR itu adalah dari usulan bupati yang kemudian dikumpulkan oleh gubernur, kemudian gubernur mengusulkan kepada menteri, kemudian menteri menetapkan wilayah pertambangannya yang salah satunya adalah WPR.

Kriteria-kriteria sudah diberikan utamanya kepada yang mempunyai potensi dan ada gangguan, sudah ada gangguan dari masyarakat itu segera ditetapkan sebagai WPR supaya dilakukan pengelolaan. Nah berapa cadangan dan lain sebagainya apakah eksplorasi, kalau WPR Pak itu 3 bulan setelah izin itu harus sudah jalan. Jadi yang tanggung jawab siapa sebetulnya untuk eksplorasi dan lain sebagainya pemerintah dalam hal ini.

Nah Minerba sendiri pada tahun 2022-2023 telah menyusun 270 dokumen pengelolaan WPR di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bangka Belitung, nah di Bangka Belitung itu seperti penjelasan dari Pak, Pak Dirjen di depan, di Bangka Belitung telah kita lakukan penyusunan dokumen di Kabupaten Bangka Selatan 9, di Kabupaten Bangka Tengah 13 dan di Belitung Timur ada 14.

Ini mungkin kelanjutannya adalah seperti yang di Dapilnya Pak Maman di Kapuas ya, itu ditindaklanjuti dengan jadi dokumen-dokumen pengelolaan



WPR yang telah disusun itu kemudian sudah kita serahkan ke masing-masing gubernur. Terus kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen **pengelolaa** lingkungan, rupanya apa? Kemarin sudah diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu **hanya UKL-UPL**.

Nah terus kemudian terhadap jaminan reklamasi dan lain sebagainya karena nanti pungutan itu adalah ke provinsi berupa IPRA Iuran Pertamanan Rakyat itu ke provinsi. Dana itulah yang nanti digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap WPR-nya, mungkin garis besarnya seperti itu Bapak terkait dengan WPR.

Kemudian terkait kenaikan royalti Pak, terkait kenaikan royalti timah pada saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi PP 26 tentang PNBP dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan naik, revisi.

**F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Izin interaktif Pimpinan.

Itu progresif ya?

**DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA (SUNINDYO SURYO HERDADI):**

Sepanjang yang saya tahu progresif Pak.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Oh ya sebenarnya harapannya kemarin tuh bisa dikonsultasikan juga dengan kami karena kan waktu itu kan konsepnya ada *baseline*, misalkan *baseline* dengan harga tertentu itu 3%, lalu ketika berjenjang naik ke atas, lalu berjenjang naik ke atas seperti itu ya sesuai dengan harga internasional. Ya sudah tapi itu sedang berproses ya? Oke, terima kasih.

**DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA (SUNINDYO SURYO HERDADI):**

Mungkin itu Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, ada tambahan mungkin dari Pak Pj. Gubernur silakan.

**PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (SAFRIZAL):**



Terima kasih Pak Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Di sinilah selisihnya karena di dalam Perpres itu disebut bahwa memang delegasi diberikan kepada pemerintah provinsi untuk menerbitkan perizinan berusaha secara efektif, efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria oleh pusat. Kami setuju yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Dirjen tapi mana jangan disebut karena kami kalau disebut nanti *ndak* bisa dilampirkan dalam BAP di kepolisian atau BAP di kejaksaan.

Tolong kami diberi kalau perlu nanti habis ini kita duduk bersama ya yang, karena delegasi untuk membuat peraturan *nggak* ada, yang ada delegasi untuk menerbitkan, tapi untuk menerbitkan kami seperti memungut iuran itu. Mana ketentuan kami memungut iuran itu? Karena di dalam HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah) sistemnya tertutup terus, *nggak* bisa kami tambah kecuali pemerintah pusat memberikan kami kewenangan untuk memungut iuran, apa, tambang rakyat itu yang kemudian sebagian kami gunakan kami kembalikan sebagai Jamrek reklamasi.

Kalau sekarang ini mengapa bolong semua di Bangka Belitung ini yang disampaikan oleh Pak Moreno Pak? Sekarang 167.000 terbuka dan itu kali 100 juta itu 14-15 triliun dari mana duitnya kalau cuman 84 miliar. Untuk hibah-hibah KONI, hibah, hibah aparaturnya setempat, hibah ustad mengaji, guru PAUD itu pun habis 90 miliar, *nggak* ada sisa, minus malah.

Oleh karenanya ini kami setuju Pak Willy tapi kami diberikan supaya ketika kami memberikan izin, ini kami *firm*. Sekarang teman saya sebelah saya ini *nggak* bisa tidur nih karena dulu sebelum ini memberikan RKAB-nya provinsi di Kepala Dinas ESDM, sekarang *nggak* bisa tidur, meleset dikit masuk penjara kalau ternyata tuduhannya tak mengawasi. Tuduhannya bisa ini kelalaian karena *nggak* mengawasi RKAB yang diberikan sekian, tapi di tambang di tempat lain diakui sebagai RKAB di situ.

Ini kami juga butuh jaminan keselamatan Bapak Pimpinan, nah ini Pak Bupati juga sama, ada yang mau kita cari pendapatan sebesar-besarnya, kita tolong masyarakat sebanyak-banyaknya tapi jaga diri dan keselamatan kita juga, kira-kira begitu. Siap diskusi dengan Dirjen Minerba untuk perumusan ini ya supaya konkret, kalau perlu ini 2 dinas saya jangan pulang dulu lah kalau belum selesai ini Pak Direktur atau salah orang pulang sekalian, supaya selesaikan kau baru pulang.

Tiap hari saya diancam demo terus, tahun 2000 berapa itu di, tahun 2000 itu kantor kami dirusak oleh massa gara-gara seperti ini. Nah ini terancam lagi nih, tiap malam orang datang ke rumah delegasi, Pak anak saya ditangkap tolong dilepas, *nggak* mungkin saya lepaskan, yang nangkap bukan saya, yang nangkap Polda.

Jadi kira-kira bahasa curhat saya begitu Pak Pimpinan, mohon izin ini apa adanya saya sampaikan supaya ada progres. Siap, kami menerbitkan izin.



**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini, ini supaya jelas dari Pak Plt. unek-uneknya masuk barang itu Pak, keluar masuk barang.

Mungkin dari Pak Bupati Belitung, saya minta silakan dari Pak Bupati, nanti dari Pak Bupati Bangka Tengah juga nanti bisa nambahin dari masyarakat, apa yang harus. Intinya inikan supaya ini komunikasinya nyambung, kita memfasilitasi untuk ini bisa berjalan.

Silakan.

**BUPATI BELITUNG TIMUR (BURHANUDIN):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Kementerian ESDM, jadi di daerah kami itu ada 14 blok, Pak. Jadi dasarnya itu awalnya dari WPR, dari WPR turun ke IPR, dari IPR itu harus menyusun UPL-UPL. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengusulkan, yang mengusulkan untuk IPR itu siapa? Bapak angkatnya siapa, pekerja tambangnya kalau ditangkap itu bagaimana nanti. Itu kita harus susun regulasinya Pak, kami tunggu itu sekarang ini karena yang tadi di lapangan saat ini Pak, masyarakat bekerja ini *kan* sudah semrawut ini bekerja, sudah semerawut bekerja Pak, jadi *nggak* punya pegangan ini. WPR sudah kita tetapkan 2022 kita usulkan, namun sampai dengan hari ini orang bertanya kepada kami, Pak ini IPR siapa yang susun, kami mau mengelola ini bapak angkatnya siapa? *Loh*, itu bukan kewenangan di kami Pak, kami *nggak* berani gitu.

Nah sampai dengan hari ini kami mohon lah ada kejelasan terhadap masyarakat kami terhadap masalah IPR ini, dokumennya. Kalau UPL-UPL-nya *oke* provinsi yang nyusun misalnya Pak iya *kan*, terus diserahkan ke siapa? Apakah perorangan atau ke pihak ketiga.

Pertanggungjawaban terhadap reklamasinya siapa? Kalau perorangan mampu *nggak* dia melaksanakan reklamasi itu. Nah ini perlu Pak untuk kita diskusikan secara bersama lah *gitu*. Sehingga kami sepulang dari ini pun kami akan menjelaskan kepada masyarakat kami, ini butuh waktu untuk masalah WPR ini *gitu*. Itu masalah WPR ya Pak Dirjen mohon maaf Pak, nah cuma saya mohon juga Pak sepulang dari ini masyarakat saya nunggu Pak, nunggu ini karena undangan saya dengan hal ini sebenarnya di kabupaten saya, udah nyebar ini Pak, di pulau Belitung udah nyebar ini Pak. Nyebarnya gimana? Menunggu siapa yang mau beli timah kami, timah kami siapa yang **mau** beli. PT Timah beli hanya punya dia, siapa beli timah kami Pak, kami mau **lebaran**, **nggak akan** mungkin ngasih makan **rakyat** dari timah ilegal, **tidak berani kami Pak**, mati kami.

Nah ini butuh penegasan Pak, untuk jangka pendek ini apa Pak Pimpinan, sehingga begitu kami pulang, ini loh hasilnya bahwa yang menampung timah rakyat ini loh begitu. Kebijakannya apa? Itu yang kami butuhkan Pak, kami ini setiap hari bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan rakyat yang mempertanyakan, Pak timah kami kapan, Pak tolong kapan, korban kami Pak anak kami mau sekolah, mau lebaran.

Ini jeritan rakyat kepada kami Pak, inilah mohon penjelasan, mohon dukungan dan juga mohon kepastian buat kami. Kami pulang Pak Pj. Gubernur Pak, kami pulang ke kampung kami bisa menjelaskan, hasil pertemuan kami seperti ini loh. Jangka pendeknya sampai dengan hari raya Idul Fitri rakyat diberi kesempatan untuk menjual timah kepada PT Timah dengan harga demikian atau *smelter* mana yang punya (suara tidak jelas 1.35.39) kan demikian Pak gitu.

Saya pikir demikian Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Bupati Bangka Tengah, silakan.

**BUPATI BANGKA TENGAH (ALGAFRY RAHMAN):**

Ya baik, terima kasih Pimpinan.

Saya dari awal hanya menyebutkan bahwa saran dari saya sampaikan kepada ESDM pusat untuk setiap apa yang telah dikeluarkan, termasuk Permen Pak itu harus ada gambaran kegiatan itu apa yang harus dilakukan oleh kami. Misalnya tambang masyarakat, biar masyarakat di bawah tuh tahu apa yang harus dilakukan. Sekali lagi memang ini saya bahasa itu saya sebut program daripada masing-masing ESDM Pak, kalau tanpa itu masyarakat *nggak* bisa.

Ini saya baca Pak misalnya izin, permohonan izin tambang rakyat, PP-nya jelas Pak, dari tahun 2020 bahkan undang-undangnya Pak. Ini PP 2021, hari ini 2024, apa yang telah terjadi? Adakah masyarakat kami bisa menjalankan ini? Tidak ada. Artinya apa? Memang programnya tidak ada Pak, aturannya ada tetapi aplikasi di bawahnya tidak ada.

Ini yang saya gugah, saya maunya ESDM juga langsung lihat, turun, buat programnya apa yang harus dilakukan, tidak bisa hanya selebar seperti ini, *nggak* bisa Pak, harus langsung Pak lihat programnya apa yang harus dilakukan. Saya kasih contoh Pak, ini real, saya sudah ketemu dengan ESDM berkaitan dengan ada satu lokasi di tempat saya itu, itu bekas eks tambang PT Kobatin yang betul menurut estimasinya itu memiliki masih kekayaan timah.

Itu disebut dengan Merbuk, Kenari, saya bertemu dengan Pak Dirut PT Timah saya sampaikan, Pak Dirut PT Timah ini kekayaan yang masih banyak,



ada timahnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk masyarakat dan negara? Saya ngadep Pak, ke ESDM, berapa kali saya ngadep itu termasuk dengan Pak Bambang, untuk mohon ini untuk bisa dikerjakan bagaimana eks PT. Kobatin ini yang masih punya kekayaan.

Saya sampai hari ini Pak, udah 2024, saya dilantik 2021, itulah yang pertama saya kejar, tidak ada jawabannya. Terakhir saya datang untuk menjelaskan ini bersama **(tidak ada suara 1.37.47-1.37.56)**

Duit negara di kabupaten saya harus minta izin tetangga saya sebelah DPRD, apa bisa selesai hari itu? *Nggak* Pak, DPRD pasti banyak tanya nya, belum politis dibilang saya mau nyalon bupati lagi, panjang ceritanya. Padahal di situ potensialnya banyak, kenapa kita tidak berbicara diskusi untuk bisa memanfaatkan itu jalur-jalurnya. Maka saya mengatakan tadi mohon izin Pak Dirjen, memang tidak ada program yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu Pak.

Terima kasih Pak.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ini terakhir dari Ormas, silakan Pak.

**SEKBER ORMAS BELITUNG TIMUR:**

Iya terima kasih Pimpinan untuk yang kedua kali.

Jadi ini untuk memperjelas aja Pak, apa sebenarnya yang terjadi persoalan di tingkat masyarakat terutama penambang Pak yang menjadi *user* dari WPR ini. Jadi sedikit cerita bahwa 10 hari sejak WPR itu ditetapkan 14 Maret 2023 yang lalu, itu kita dari masyarakat penambang Pak saking tidak mau dikatakan ilegal kita udah ajukan permohonan IPR itu melalui OSS Pak, itu sebanyak 30 permohonan. Tapi ketika kita meng-*input* data semua persyaratan yang ada, udah selesai dan muncul pesan di OSS itu adalah bahwa anda tidak bisa melanjutkan proses perizinan karena belum memenuhi standar perizinan dari lingkungan, Pak. Itu bunyi informasi yang disampaikan oleh OSS.

Nah kita tunggu sampai sekarang juga masih sama Pak informasi yang dimunculkan oleh OSS tadi. Jadi kita apa namanya langsung berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi, dalam hal ini Dinas ESDM bahwa ternyata memang sampai dengan saat ini Pak belum ditetapkan dokumen lingkungan seperti apa *gitu*. Jadi itu sebenarnya persoalan kalau terkait dengan perizinan ini Pak, itu. Nah jadi sampai dengan berjalannya rapat ini Pak, malahan kami



belum mendengar satupun bahasa dari Dirjen Minerba itu mengaitkan dengan masalah dokumen lingkungan ini Pak.

Jadi mohon kepada Dirjen Minerba *gitu* untuk memberikan semacam solusi *gitu* Pak, walaupun memang dalam hal ini masih belum diatur secara tegas dalam Permen ya mohon Pak itu segera diatur *gitu* agar kita masyarakat penambang di sini bisa mengurus izin secepatnya *gitu* Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, terima kasih Bapak.

**F-GERINDRA (MORENO SOEPRAPTO):**

Mungkin sedikit Pimpinan, jadi Bapak-bapak saya yakin kalau Pak Dirjen karena ini banyak peninggalan dari sebelumnya ya dan setelah ini juga di *(suara tidak jelas 1.41.11)* sampaikan tadi *coaching clinic* itu juga sudah berjalan. Saya yakin tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan ini secepatnya, saya rasa ini masalah sosialisasi, itu teknis. Jadi kami mendorong untuk komunikasi diantara beliau-beliau Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, terima kasih Pak Moreno.

Nah mungkin selanjutnya dari meja pimpinan ada yang ingin menambahkan? Pak Sugeng, Pak Eddy.

Pak Dirjen, saya pikir ini mereka pengen bawa oleh-oleh Pak, pulang ke Bangka Belitung pengen bawa oleh-oleh. sebetulnya kalau bawa oleh-oleh seperti yang diinginkan tadi Pak, jawaban ini siapa pembeli timahnya ini sekarang? Jujur Pak kami hanya memfasilitasi dan ini juga Dirjen Minerba yang ingin bisa menyikapi, tapi ini juga butuh, jujur butuh waktu Pak karena ada peraturan yang harus menyangkut di sini Pak.

Jadi tidak semata-mata hari ini kita bisa, oke kasih ini bisa ambil barangnya karena kita terkait dengan undang-undang yang ada, peraturan yang ada. Tapi saya jujur saya minta juga dari Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Minerba bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang ada hari ini hadir, dari mulai provinsi dan kabupaten mencari titik terang Pak, jalan keluar buat mereka Pak karena ujung-ujungnya apa? Polemik ini terjadi yang dikorbankan ya kita-kita enggak merasa Pak, rakyat yang dikorbankan.



Rakyat yang kena beban ini, contoh misalnya tadi disampaikan rakyat sudah menambang, ini barang mau dijual di mana? Ada di rumahnya di kantong-kantong *kan* mereka punya timah, mereka mau jual kemana, begitu dia impor nanti tangkap tapi dia perlu makan Pak hari ini. Nah ini jadi dia nyelundup segala macam, akhirnya lari kemana-mana karena bicaranya apa? yang mendorong mereka menyelundup adalah perut Pak.

Ini yang yang kita harus pikirkan Pak Dirjen, mohon izin mudah-mudahan setelah rapat hari ini saya minta untuk duduk sama-sama Pak, antara provinsi kabupaten dan ada Dirjen yang diminta difasilitasi oleh Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Minerba, sari solusinya Pak. Sosialisasikan dengan mereka apa yang langkah yang akan bisa dilakukan *gitu* Pak, kira-kira begitu Pak Dirjen.

Silakan Pak untuk menjawab, terima kasih.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Dari Direktur Mineral mungkin ada tambahan dulu Pak sebelum kami sampaikan nanti.

*Monggo* silakan Pak Direktur.

**DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA (SUNINDYO SURYO HERDADI):**

Terima kasih Pak Dirjen.

Pak Pimpinan tadi disinggung terkait dengan yang pertama setelah menjadi WPR, WPR itu telah ditetapkan oleh menteri yang pertama memang harus ada dokumen pengelolaan WPR. Dokumen pengelolaan WPR itu untuk yang pertama seperti saya sampaikan tadi, untuk yang saat ini kita telah menyusun 270 dokumen pengelolaan WPR, yang terdiri dari deskripsi teknis WPR-nya, terus kemudian pengelolaan keselamatannya seperti apa, upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta standar pemantauan lingkungan hidupnya seperti apa. Itu di dalam dokumen pengelolaan WPR-nya itu ada.

Kemudian setelah dokumen pengelolaan WPR itu ada dilanjutkan dengan penyusunan dokumen lingkungan, dokumen lingkungan itu sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian ESDM itu adalah UPL-UPL. Pemrakarsanya provinsi karena memang IPR ini *kan* tujuannya memang untuk masyarakat pada saat Undang-Undang 3 Tahun 2020 dirumuskan, tapi di beberapa daerah memang ada juga yang inisial pemrakarsanya adalah kabupaten.

Terus kemudian terkait dengan apa mekanisme dan tata cara apa penjualan, ini mungkin kalau karena masing-masing ini adalah mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri Pimpinan, untuk timah memang spesifik harga jual timah adalah pada setelah peleburan atau setelah pemurnian. Jadi memang beda dengan nikel yang di OR-nya dia kena royaltinya, di OR tapi memang betul-betul timah ini memang spesifik sampai kepada olah murni.

Mungkin demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Buat saya ini bukan menjadi satu solusi ya, ini saya piker, saya pikir ini harus duduk, bener-bener duduk sama-sama berhadapan Pak. Kalau boleh setelah ini dilakukan duduk dan keluar dari ruangan hasil pertemuan dengan karena kami hanya fasilitasi hari ini, tapi nanti duduk diantara Kementerian ESDM dengan provinsi dan kabupaten cari jalan keluarnya, saya pikir itu.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Pimpinan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar, sebentar, saya minta Pak Dirjen mau menjawab, kira-kira bagaimana Pak Dirjen?

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG  
SUSWANTONO ):**

Terima kasih, Pak.

Sebetulnya 3 minggu yang lalu kita sudah berinisiasi untuk menyelesaikan tata kelola timah ini Pak, saya mengundang Dirut PT Timah dan beberapa *stakeholder* di kantor saya Pak. Kita membicarakan masalah penyelesaian timah di Bangka Belitung ini Pak. Kemudian kita juga merencanakan untuk pertemuan berikutnya Pak, kemudian beberapa minggu yang lalu Pak Bambang Patijaya juga memberikan bola ini, langsung saya tangkap Pak. Mari kita selesaikan sampai tuntas.

Nah kalau ini terjadi beberapa pendapat dan mungkin apa yang dikatakan Bapak tadi miskomunikasi saja, kita di pusat ini *kan* juga banyak sekali yang kita kerjakan Pak ya begitu nanti daerah minta izin untuk WPR kita memberikan persetujuan untuk WPR, namun ada beberapa hal yang harus



dikerjakan oleh provinsi dan barangkali ini tidak nyampai ke daerah, Pak nanti saya serahkan Bapak ini Pak, silakan ditindaklanjuti ya.

Oleh karena itu Pak, kesepakatan kita bersama saya berharap ini tuntas. Saya mohon kalau sore ini *nggak* tuntas Pak, mungkin terbentur dengan kegiatan buka puasa bersama dan saya juga perangkat saya ada beberapa orang yang tidak hadir, kalau diizinkan mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati berkenan nginep lagi semalam, besok kita bicara di kantor kita, kita sosialisasikan biar semuanya tuntas ya, setuju *nggak*? *Nggak* biar Bapak-bapak kita juga jelas terbuka semuanya. Kalau Pak Bambang Patijaya mau hadir *monggo*, silakan.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Saya tongkrongin Pak Dirjen.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Nah, saya izinkan kalau boleh Pak besok siang atau besok jam berapa kita. Barangkali besok pagi jam 9 Pak di Minerba Pak, kami siap untuk memulai rapat bersama dengan beberapa tokoh masyarakat dari Bangka Belitung untuk menyelesaikan ini agar tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari, tapi dengan catatan kita tetap ada regulasi-regulasi yang harus diselesaikan. Kita dukung itu Pak dan harus tuntas.

Demikian Pak, *monggo* silakan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Siap, Pak Dirjen terima kasih.

Apresiasi dulu ke Pak Dirjen sebentar, terima kasih. Ini betul-betul buat saya ini solusi supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu kembali tahu apa yang harus kita lakukan *gitu* Pak, *gitu* ya Bapak.

Tadi ada yang memasukkan sebentar Pak Bupati Bangka Tengah, silakan.

**BUPATI BANGKA TENGAH (ALGAFRY RAHMAN):**

Oke Pak, terima kasih Pak Pimpinan.

Jadi saya, kami setuju Pak bahwa saya setuju Pak Dirjen mau mengadakan pertemuan besok pagi tetapi kami harap malam ini teman-teman ESDM pusat sudah punya *roadmap* ya apa yang harus kita lakukan besok pagi itu pertemuannya, jangan dilemparkan ke kami ya semuanya, tetapi minimal



teman-teman sudah ada *roadmap*-nya. Tadi masalah IPR, kita bicara IPR UPL, UKL siapa yang bikin misalnya, itu sudah mulai mereka sudah mulai punya Pak jawaban-jawaban. Terus timahnya, reklamasinya siapa yang harus bertanggung jawab.

Maksud kami jangan dilemparkan ke kami Pak, mereka dulu. Selama ini izin itu di sana Pak, bukan di kami, sudah ditarik. Kami tidak punya kewenangan apa-apa itu Pak persoalannya.

Terima kasih Pak.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Saya pikir dari Dirjen Minerba sudah siap ya untuk membahas ini, *roadmap*-nya juga sudah ada mungkin Pak Tri ya.

Coba silakan dijawab dulu Pak.

**DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA  
(SUNINDYO SURYO HERDADI):**

Izin Pimpinan, hanya menyampaikan menanggapi dari Pak Bupati tadi bahwa di dalam format dokumen pengelolaan WPR yang kita susun itu sebetulnya dokumennya isinya lengkap Pak, termasuk di antaranya substansi tentang tata cara pengelolaan lingkungan hidup dan lain sebagainya, termasuk eksploitasinya yang tadi ditanyakan oleh Pak Pj. Gubernur.

Jadi poinnya Pak untuk *roadmap* untuk pengolahan WPR sekarang yang di Kapuas saja sudah keluar Pak IPR-nya Pak. Jadi memang *roadmap* apa yang musti kita harus sampaikan, mungkin *roadmap*, *nggak* karena sudah ada yang sudah keluar Pak, izin, izin pertambangan rakyatnya sudah ada yang di Kalimantan Barat.

**BUPATI BELITUNG TIMUR (BURHANUDIN):**

Izin Pak Direktur, saya pikir kalau kami di daerah ini kan tidak memiliki kewenangan dalam regulasi yang menyangkut menerima surat pemberian izin, Pak. Jadi ini *kan* antara pemerintah pusat dengan Pemprov, izin WPR dan IPR itu *kan* ketentuannya dari pusat dan provinsi Pak. Kalau kami di daerah tinggal menunggu, kalau Pak Dirjen ingin rapat jam 9 besok ya silakan dengan provinsi Pak, kalau kami *kan* menunggu Pak sifatnya di daerah karena *kan nggak* punya kewenangan itu Pak Dirjen mohon maaf, Pak.

Jadi Pak Gubernur dengan Dirjen ESDM untuk mendiskusikan masalah ini ya kami *monggo*, kami tinggal menunggu Pak kapan.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Begini Pak, tadi Bapak menyampaikan arahnya kepada ESDM, saya serahkan buku itu silakan dibaca. Kalau menyangkut provinsi ya silakan daerah dibicarakan *kan* begitu Pak iya *kan. Monggo*, saya ngajak bicara kapan, siapa aja, *monggo*, mau Bapak hadir *monggo* silakan ya. Ini kan daerah Pak, mau daerah dari provinsi atau bupati *monggo* silakan. Saya *nggak* melihat sana Pak, silakan hadir. Itu kan kapan aja, besok pagi barangkali bisa, silakan jam 9.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya coba silakan yang terakhir dari Ormas.

**SEKBER ORMAS BELITUNG TIMUR:**

Terima kasih.

Jadi kami dari Sekber kembali menekankan bahwa kami ini membawa aspirasi masyarakat Pak, jadi keinginan masyarakat kami penambang ini Pak ingin bekerja itu supaya tidak ilegal, Pak. Intinya seperti itu dan saat ini masyarakat kami ini masyarakat yang perwakilan kami ini ingin mengatasi perutnya *gitu* Pak yang lapar, Pak. Jadi kami datang ke sini ini berharap agar menjelang lebaran ini kami tidak kucing-kucingan atau dikejar-kejar sana-sini Pak, intinya seperti itu Pak.

Jadi kami ini memberikan contoh Pak, ini mohon Pak Dirjen bahwa tadi di *slide* Bapak juga ada disampaikan bahwa ada IPR yang sudah keluar, contohnya di Tasikmalaya. Ini, ini di sana kok bisa sudah keluar *gitu* Pak, sementara perizinan kami yang sudah lama kami usulkan seperti yang disampaikan rekan kami, kok tetap dalam OSS itu tidak bisa terus *gitu* Pak. Sementara dari daerah lain ada yang sudah bisa keluar *gitu* Pak.

Jadi kalau memang bisa Pak, kami berharap ada dari dirjen untuk membikin semacam surat edaran yang bisa digunakan, bukan hanya di Bangka Belitung *gitu* daerah lain juga bisa *gitu* Pak.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.

**PERWAKILAN SEKBER ORMAS BELITUNG TIMUR:**

Pak, sedikit Pak ini kami nggak puas, Pak.

Kami ini satu minggu di Jakarta nih Pak, sudah satu minggu itu rombongan saya itu ramai 25 orang. Ini Bapak Dirjen ini kelihatannya main-main ini, padahal ini *kan* ini berkaitan dengan kabupaten kami. Inikan kecil

persoalannya kalau otaknya main, kecil persoalannya. Kalau rusak *kan* lingkungan kami yang rusak, percayakan dengan bupati kami.

Artinya tolong jangan semuanya adanya di daerah, adanya di pusat, di pusat, pusat *nggak* tahu kok nanti kami tenggelam. Artinya berikan kekuasaan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati untuk menjaga lingkungannya. Kami yang nambang kami yang tanggung jawab. Nah begitu PAD kami yang bayar kok, kami pajak kami bayar nanti, **ambil 1.54.39**) ke daerah

Pak, terima kasih Pak ada sedikit ini Pak, terima kasih Pak ya.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Bambang Patijaya, silakan.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, Pimpinan dan semua peserta rapat.

Saya pikir sebetulnya sudah ada suatu jalan keluar, kita bersabar sedikit. Ini *kan* besok sudah diberikan ruang oleh Pak Dirjen untuk ngobrol ya *kan* di ruangan, di kantornya beliau dan saya pikir ini sudah ada satu jalan. Mungkin tidak semuanya harus dibicarakan terang benderang di sini ya *kan*, mungkin harus kita bicarakan setengah kamar kah atau apakah *kan* seperti itu.

Nah jadi saya pikir ini kita sambut baik ya ajakan Pak Dirjen Minerba, sehingga nanti banyak hal-hal yang besar, yang bisa mungkin nanti kita bisa selesaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, terima kasih.

Pak Dirjen saya pikir cukup ya ada komitmen dari Pak Dirjen, sudah akan bertemu besok jam 9 tapi izin kami mohon juga ini segera nanti setelah apa hasil pertemuan itu diinfokan lagi kepada kami karena kalau perlu kita bisa harus rapat lagi juga kami akan rapat lagi untuk menentukan sikap, apa yang harus kita lakukan.

Terima kasih Bapak-bapak.

Cukup saya pikir Pak Dirjen atau ada mau tambahan Pak Dirjen? Cukup. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dan penjelasan dari Bapak-bapak, Ibu semua yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan



kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi VII bisa kita mulai dengan kesimpulan, supaya tahu apa arah kita hasil dari rapat hari ini dan sekali lagi saya inginkan setelah pembahasan besok dan ini adalah satu jalan solusi, pembahasan betul-betul kita buka semua seperti yang Pak Bambang Patijaya sampaikan tadi, harus kita bicarakan detail. Detail tidak bisa di ruangan ini, detail nanti dengan instansi terkait nanti akan bicara apa yang harus mereka lakukan. Kembali lagi saya titip Pak, ini kepentingannya untuk perut rakyat Pak, itu yang paling utama betul Bapak-bapak ya? Terima kasih.

Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dan pandangan Bapak-Ibu Komisi VII DPR RI.

Selanjutnya kami mulai dengan kesimpulan, silakan.

1. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk., Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Ketua Asosiasi Ekspor Timah Indonesia dan Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur untuk segera berkoordinasi guna menyelesaikan permasalahan terhambatnya penerbitan Izin Penambang Rakyat (IPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar proses pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dipercepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menerbitkan petunjuk teknis (Juknis) penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) dan disosialisasikan ke seluruh daerah, sehingga kegiatan penambangan rakyat dapat berjalan dan menghindari kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat berhentinya kegiatan penambangan rakyat.

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**



4. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk segera memperbaiki tata kelola dan tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kegiatan pertambangan timah dapat berjalan dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk., Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Ketum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia dan Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 2 April 2024.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Pimpinan yang *nggak* hadir jangan dicantumin namanya asosiasi.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh iya itu asosiasi masyarakat eksportir timah Indonesia *nggak* ada di sini, dihilangkan semua iya, ya di atas juga itu yang, itu *nggak* ada semua, *nggak* hadir mereka.

**F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Iya lah yang hadir aja.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, nomor 5 tadi setuju ya? saya baca ulang ya.

5. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk., Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, serta Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 2 April 2024.



Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

**WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T./F-PG):**

Izin Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat sore,

Salam hormat buat Pak Plt. Dirjen, Bapak Pj. Gubernur Bangka Belitung dan Dirut PT Timah, Pak Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah dan Sekber Ormas Belitung Timur.

Mohon maaf saya telat tapi saya pikir saya bela-belain datang karena saya mau diskusi satu hal aja, ini mumpung ada Pak Plt. Dirjen dan saya meyakini isunya kurang lebih hampir mirip-mirip juga tapi saya *in general* Pak Pimpinan.

Interaktif Pak Plt. Dirjen, ada pertanyaan sederhana saya kenapa sih Pak RKAB itu kok susah sekali keluarnya Pak. Saya yakin tadi udah sempat didiskusikan karena saya *live* di *YouTube* saya dengar, tapi ini khusus saya mau nanya khusus ke Plt. Dirjen dari Fraksi Partai Golkar dan ini masalah serius Pak. Ini masalah serius, kenapa sih Pak kok RKAB itu susah sekali keluar *gitu* Pak, itu aja dulu interaktif sedikit, Pak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG SUSWANTONO ):**

Terima kasih, Pak Maman.

Sebetulnya pertanyaan ini sama dengan seminggu yang lalu Pak pada saat RDP di tempat ini Pak, sudah kami jelaskan Pak. Jadi kalau saat ini ada pertanyaan kenapa RKAB keluarnya kok sulit? Saya jawab tidak sulit Pak, saya jawab tidak sulit asal dengan catatan, si pelaku usaha bisa melengkapi persyaratannya Pak karena selama ini pelaku usaha belum bisa melengkapi persyaratannya.

Kita udah kooperatif bulan Februari yang lalu, kami buka *coaching* klinik Pak. Kita buka 10 lapak, 1 hari 4-5 perusahaan *on the spot*. Kita paparan, kita jelaskan semuanya. Itupun ada 3-4 kali perusahaan belum bisa menyelesaikan juga, keterlambatan di mana ini? Saya juga dikejar-kejar menteri saya Pak. Kenapa kamu lambat? Pak kami udah siap Pak, tapi pelaku usahanya yang belum bisa melengkapi, belum bisa merespon.

Yang kami temukan di lapangan selama ini Pak, ternyata kalau boleh saya ambil kesimpulan Pak staf-stafnya daripada pelaku usaha itu yang malas

untuk melengkapi persyaratan. Dia melapor pada bos-bosnya, Pak sudah Pak sudah kita kirim, ternyata nggak ada Pak teman saya para pimpinan perusahaan pada kontak-kontak kita. Pak kami sudah kirim Pak, coba saya cek ya? Belum ada Pak.

Ini yang sering terjadi Pak, jadi staf perusahaan yang malas untuk melengkapi persyaratan RKAB.

**WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):**

Terima kasih Pak, itu penjelasan satu ya.

Yang kedua, Bapak *kan* jadi Plt. Dirjen 6 bulan ada ya, 6 bulanan ya, 7 bulan. Berarti Bapak itu dibohongin sama anak buah bapak, kami ini di Komisi VII Pak, saya ini udah 2 periode Pak, ini masalah klise.

Sekarang saya mau nanya lagi yang kedua Pak, mudah-mudahan jawaban ini nanti bisa memoderasi perbedaan pandangan di antara kita. Sekali lagi saya sampaikan ini saya tidak bertujuan untuk mendeskripsikan siapapun, tapi tujuan saya menyampaikan ini dan ini perlu menjadi perhatian kita semua karena implikasi dari telatnya terbit RKAB itu ada 2 hal, ekonomi terhambat di bawah dan membuka ruang terjadinya praktik *illegal mining*.

Oke Pak ya, nah sekarang pertanyaan saya yang kedua. Apakah Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Minerba sudah melakukan sebuah langkah membagi dua proses administrasi yang dulu pernah kita bicarakan. Syarat pengajuan administrasi RKAB itu ada dua, kita pisahkan waktu itu.

Syarat administrasi khusus yang wajib dan fundamental yang tidak boleh tidak disiapkan oleh para perusahaan itu. Lalu yang kedua, ada syarat administrasi *supporting*. Artinya Pak kita dulu menyarankan memberikan sebuah solusi bagi syarat-syarat administrasi yang substantif, yang fundamental itu wajib dipenuhi tetapi yang sifat-sifatnya *supporting, monggo* itu dibicarakan di internal Bapak itu bisa di nomor 2-*kan* atau di nomor 3-*kan* dalam hal ini menyusul.

Itu dulu kita udah pernah diskusi Pak, bahkan ini *kan* dulu perdebatan RKAB ini *kan* ada dua hal waktu itu, masalah administrasi dan yang kedua permasalahan 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. *Alhamdulillah* saya apresiasi Pak Kementerian ESDM sepengetahuan saya RKAB 3 tahun ya, itu kita berikan *applause* dulu lah buat ESDM, tetapi yang belum tuntas hari ini menurut saya dalam hal ini Fraksi Partai Golkar di Komisi VII dalam konteks syarat administrasi itu.

Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Hampir tidak mungkin kalau kita mendorong semua pelaku-pelaku usaha Migas dia harus menyiapkan dokumen administrasi yang begitu banyak, baik itu pertambangan di tengah kondisi yang dulunya nih izin di daerah Pak, ditarik ke pusat. Yang dulunya



Bapak mungkin hanya mengurus 500 IUP sekarang ini ribuan IUP di bawah Bapak.

Artinya apa? Dulu kita menyarankan dibagi menjadi dua syarat administrasi itu, syarat administrasi dokumen yang wajib dengan syarat administrasi dokumen yang sifatnya *supporting*, supaya nanti yang dokumen yang wajib, wajib itu dipenuhi tapi yang *supporting* bisa menyusul. Yang terpenting pergerakan operasional di bawah ini bisa berjalan *gitu*.

Maksud saya sebetulnya dalam forum ini, saya tidak ada bermaksud kita mendeskripsikan siapapun karena tujuan kita ini ingin melakukan akselerasi percepatan ekonomi daerah. Nah kata kunci pertamanya itu RKAB, dulu *tuh* setahun yang lalu kita pernah konsinyering Pak membahas permasalahan Mandiodo. Kita ingat sekali dulu, akhirnya ada korban itu orang yang sangat kita banggakan Pak Ridwan Djamaluddin kena menjadi korban permasalahan ini. Ini yang saya selalu tegaskan dari dulu, yuk kita sama-sama benahi ini.

Kalau tadi kita bebaskan sepenuhnya kepada pengusaha, tetapi di kita Komisi VII dan teman-teman ESDM tidak melakukan introspeksi di dalam dalam konteks pengajuan administrasi saya yakin nggak akan selesai masalahnya Pak karena ini udah 4 tahun, masalahnya ini terus berputar. Belum lagi kalau misalnya saya masuk ke bawah, saya masuk ke bawah lagi, mohon maaf dalam forum yang terhormat ini saya sebetulnya mau menggugat.

Saya tidak rela kalau yang menjadi korban itu hanya Dirjen dan teman-teman aparatur ESDM, pintu masuk pertama terjadinya manipulasi data dan administrasi itu evaluator. Ada penindakan tegas terhadap evaluator-evaluator itu, *kan nggak* ada nih hari ini.

Jadi makanya mohon maaf Pak saya harus sampaikan ini, ini demi kebaikan Bapak-bapak semua dan kita-kita semua. Kita sayang dengan teman-teman ESDM, banyak teman-teman saya di dalam situ tapi kita juga sayang kepada masyarakat-masyarakat di bawah agar ekonomi bergerak semua. Kita *nggak* ingin lagi permasalahan *crowded*-nya, semrawut permasalahan perizinan ini mendatangkan korban-korban teman-teman kita yang menurut kita cukup punya kompetensi di ESDM ini.

Maka dari itu kami tadi saya mendorong, yuk kita seriusin itu *kan* syarat administrasi dibagi 2, ada dokumen yang wajib, ada dokumen yang *supporting*. Saya *nggak* tahu *tuh* ada berapa total dokumen yang dibutuhkan, mungkin kalau nggak salah 9 sampai 10 dokumen misalnya prasyaratnya, itu dipisahkan Pak menjadi dua Pak.

Kalau memang Bapak-bapak butuh dukungan politik untuk memperkuat *positioning* kebijakan Bapak, kita siap Komisi VII melakukan dukungan politik itu. Mohon maaf Pak, saya orangnya sangat teknis, saya *nggak* ingin kita membuat sebuah kesimpulan yang kayak begitu tapi saya pikir Pimpinan mohon izin. Mungkin habis ini kita buat sebuah rapat sekali lagi untuk memberikan kekuatan legitimasi politik kepada Bapak-bapak di ESDM. Di



mana kesimpulannya itu kita bedah *tuh* syarat administrasinya, kalau *nggak* salah setahu saya itu ada 9 atau 10 ya, saya *nggak* ngerti, banyak sekali.

Nah itu di bawah, ini saya di luar lagi nih, dalam konteks untuk menertibkan itu semua. Evaluator-evaluator itu tertibkan itu Pak, itu semua pintu masuknya dari situ, akhirnya jadi korban bapak-bapak nih. Mohon maaf Bapak sekarang Plt. Dirjen, kita *nggak* pernah tahu masa depan kita akan terjadi seperti apa tapi **(tidak ada suara 2.10.27-2.10-38)**.

Evaluator, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga orang yang terpukul pada saat seorang Ridwan Jamaludin, Pak Dirjen kita itu beliau orang baik, siapa lagi direktornya Pak? Pak Sugeng **(suara tidak jelas 2.10.54)** kalau istilah saya karena beliau lulusan Rusia. Itu menjadi korban dalam konteks permasalahan dokumen-dokumen kayak begini, padahal semuanya Bapak, Pak Direktur itu dapat data *kan* semua ddari evaluator, kok bisa-bisanya Bapak-bapak yang disalahkan.

Nah ini loh maksudnya, saya *nggak* ini Pak ya, juga kita ingin agar ini semua terbangun sebuah semangat yang positif. Saya pikir mohon maaf Pimpinan kalau saya di akhir ini tapi bagi saya ini sekedar untuk kita jadikan bahan *brainstorming* kita bersama karena kasihan sekali lagi gara-gara ulah seseorang akhirnya yang jadi korban Bapak-bapak semua di level atas.

Yang kita marahin *kan* Bapak-bapak semua, Pak Dirjen, Pak Direktur itu di *working level*, main semua itu, berjoget-joget itu mereka. Bilanglah begini ke Bapak, bilang lah begitu, padahal ya udah deh daripada kita berantem-berantem, daripada kita berdebat-berdebat.

Nah usulan konkretnya itu tadi Pak, dipisahkan aja Pak, dokumen wajib berapa, siapkan. Dokumen wajibnya ada berapa banyak, dokumen *supporting*-nya menyusul *gitu* loh supaya ini berjalan, berjalan nih Pak. Itu dulu udah pernah kita diskusikan di era yang sebelumnya, mudah-mudahan harapan saya usulan konkret ini selain tadi kita sudah 3 tahun, saya yakin itu sudah meringankan beban teman-teman di pelaku-pelaku usaha.

Ditambahkan lagi permasalahan memisahkan antara dokumen wajib dengan dokumen *supporting*, supaya tidak harus semuanya dipenuhi baru ini bisa berjalan. Jadi dokumen yang *supporting*, usulan konkret saya itu bisa menyusul *gitu*. Nah itu pernah waktu itu kita bicarakan juga itu di level Pak Menteri, di level Pak Dirjen juga waktu itu Pak Ridwan Djamaluddin.

Itu saja Pak Dirjen mohon maaf, Pak Dirjen saya harus sampaikan ini. Sekali lagi mungkin kata-kata saya ini terkesannya agak nyelekit tapi demi kebaikan Bapak-bapak, kami *nggak* mau lagi kejadian ada lagi Pak Ridwan, Pak Ridwan Djamaluddin di ESDM.

Saya yakin teman-teman Bangka Belitung cukup familiar dengan Beliau karena pernah menjadi Pj. Gubernur dan saya tidak ingin terjadi lagi Pak

Sugeng, Pak Sugeng lagi, ini Pak Tri segala macam yang akhirnya mereka yang menjadi korban dan kita semua akhirnya bingung sekarang.

Itu saja Pak, jadi terima kasih Pimpinan.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Maman.

Saya pikir demikian pembahasan dari kesimpulan RDP dan RDPD pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat ini kami persilakan Bapak Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM sebagai perwakilan untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan Bapak.

**PLT. DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (BAMBANG  
SUSWANTONO ):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Pimpinan,  
Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua dan Wakil Ketua, seluruh Anggota Komisi VII DPR, serta peserta rapat sekalian.

*Alhamdulillah* agenda rapat kerja dengan agenda pembahasan penjelasan tentang petunjuk teknis penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR telah selesai dilaksanakan. Meskipun besok kita harus bertemu lagi untuk mematangkan itu.

Arahan yang telah disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta masukan-masukan dari para pemangku kepentingan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga ke depan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah pertambangan rakyat dan pengelolaan izin pertambangan rakyat dapat memberikan solusi dan manfaat, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas undangannya dan inisiasinya, dan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini.

*Wabillahittaufig wal hidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/  
WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih kami sampaikan kepada Plt. Dirjen Minerba, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Dirut PT Timah Tbk., Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur, serta seluruh jajaran dan atas kerjasamanya yang baik dalam rapat ini.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang telah mengikuti RDP dan RDPU ini hingga selesai.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* RDP/RDPU ini pada hari ini saya tutup.

*Billahittaufik walhidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive mark.